



**KONFLIK ELIT POLITIK
DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1803-1821**

Tesis

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum)
dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Islam di Indonesia

Oleh:

**RAVICO
NIM. 211 030 1154**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2013**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, kota Palembang termasuk kota tertua dengan sejarah yang cukup panjang yang dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Kota Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan dan ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Safwan,2004:14). Berdasarkan prasasti Kedukkan Bukit peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah Barat kota Palembang pada tanggal 16 Juni 682 M, berisi mengenai pembentukan sebuah *wanua* yang ditafsirkan sebagai kota. Gabriel Ferrand mengatakan Kerajaan Sriwijaya berdiri tahun 392 M. Pendapat ini berdasarka kepada kronik Cina yang menyatakan tentang negeri bernama *She-yeh (Cho-ye)* artinya jaya, atau wijaya atau sriwijaya. Kemudian I-Tshing menyebut Sriwijaya dengan sebutan *Shih-li-fo-shih*. Sementara catatan Arab menyebut Sriwijaya dengan *Syarbazah* (Idi, 2001:1).

Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim merupakan pusat perdagangan Internasional, pusat pendidikan, penelitian keagamaan Budha dan pusat pertemuan berbagai bangsa. (Idi,2001:2). Kejayaan Kerajaan Sriwijaya didorong oleh berkembangnya hubungan pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan tiga kerajaan besar abad ke-7 M, yaitu Dinasti Tang di Tiongkok, Dinasti Bani Umayyah di Asia Barat, dan Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara (Tjandrasasmita,2009:81).

Kejayaan Kerajaan Sriwijaya membuat para elit bangsawan selanjutnya tidak lagi memikirkan rakyat, karena berlimpahnya harta yang dimiliki. Hal ini berakibat lemahnya pemerintahan, krisis kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan, munculnya upaya disintegrasi di wilayah-wilayah kerajaan, dan lemahnya perekonomian.

Lemahnya kekuatan Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Majapahit. Tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya mampu ditaklukan oleh Kerajaan Majapahit (Safwan,2004: 10).

Selepas penaklukan, ternyata Majapahit tidak dapat mengontrol wilayah Palembang dengan baik yang berakibat terjadinya dominasi oleh para saudagar dari Cina (Tiongkok). Pengaruh kuat orang-orang Cina berakhir ketika raja Kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya V ([wafat 1478 M](#)) mengirimkan utusannya untuk memimpin Palembang, bernama Adipati Arya Damar (Abdullah,1986:42). Arya Damar berhasil menaklukan Palembang. Keberhasilannya menaklukan Palembang, kemudian ia dinobatkan menjadi raja dan memimpin tahun 1455–1486 untuk wilayah Palembang. Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya Arya Abdillah atau Arya Dillah.

Keberhasilan Arya Dammar merupakan kabar gembira Kerajaan Majapahit, di sisi lain terjadi konflik internal kerajaan. Dimana para selir sangat cemburu terhadap Putri Campa ketika Prabu Brawijaya V menikahinya. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas kerajaan. Kemudian Putri Campa yang tengah mengandung dikirim ke Palembang. Tidak lama kemudian, Putri Campa melahirkan seorang anak dan diberi nama Raden Fatah yang kelak menjadi raja dari kerajaan Islam di Pulau Jawa (Aly,1986:135).

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh karena desakan kerajaan-kerajaan Islam, Sunan Ampel sebagai wakil Walisongo mengangkat Raden Fatah menjadi penguasa seluruh Jawa, menggantikan ayahnya. Pusat kerajaan Jawa dipindahkan ke Demak. (Yatim,2007:210-211). Kesultanan Demak mengalami masa-masa sulit ketika Raden Fatah wafat. Konflik elit bangsawan dalam perebutan tahta terus terjadi, hingga Kerajaan Demak jatuh ke tangan Kerajaan Pajang.

Dalam kemelut yang terjadi atas penyerangan Demak oleh Pajang ini, berpindahlah 24 orang keturunan Pangeran Trenggono (atau Keturunan Raden Fatah) dari kerajaan Demak ke Palembang, dipimpin oleh Ki Gede Sedo Ing Lautan dan anaknya Ki Gede Ing Suro Tuo yang datang melalui Surabaya ke Palembang dan membuat kekuatan baru dengan mendirikan Kerajaan Palembang. Keraton pertamanya di Kuto Gawang. Namun Kerajaan Pajang tidak berusia lama. Dari Pajang kelak lahir Kerajaan Islam Mataram, dan Kerajaan Palembang menjadi wilayah protektorat (daerah pelindung) dari Kerajaan Mataram. (Abdullah,1986: 47).

Hubungan Palembang dengan kerajaan-kerajaan di Jawa berlangsung selama berabad-abad sejak abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-17 sejak Majapahit, Demak-Pajang sampai dengan Mataram. Dalam hubungan ini tidak luput dari peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban untuk datang menghadap raja (*seba*) sebagai bukti loyalitas, menghantarkan upeti kepada raja dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam peperangan (Amin,1986:77-78).

Semula hubungan ini berlangsung secara baik dan teratur, namun dalam perkembangannya membawa perubahan, khususnya semasa Kerajaan Mataram. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid IV yang dikutip oleh Amin (1986: 81) disebutkan dalam sejarah Kerajaan Mataram nampak sekali hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan baik. Pengalaman dari penguasa Kerajaan Palembang selalu mengalami penolakan dari Kerajaan Mataram. Ketika Pangeran Sido Ing Rajek berkuasa dan mengirim utusan ke Mataram, ditolak oleh Amangkurat I. Hal serupa terjadi pada penguasa-penguasa sebelumnya.

Tahun 1659, kekuasaan Kerajaan Palembang diserahkan dari Pangeran Sido Ing Rajek kepada Pangeran Ratu Ki Mas Hindi yang memerintah tahun 1659-1706. Pada masanya agama Islam tersebar dengan luas dan Kerajaan Palembang berhasil melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Mataram-Jawa serta merubah nama Kerajaan

Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Ratu Ki Mas Hindi memperoleh Gelar Sri Susuhunan Abdurahman Cinde Walang (Utomo dkk, 2005:176).

Kesultanan Palembang Darussalam harus mengalami derita pahit di awal peresmiannya. Tahun 1659, Keraton Kuto Gawang yang menjadi pusat Kesultanan dibakar oleh Belanda. Pemicu konflik disebabkan dibantainya orang-orang Belanda di kapal yang berlabuh di Sungai Musi oleh Pangeran Side Ing Rajek. Sehingga pusat Kesultanan Palembang Darussalam dipindahkan ke Keraton Beringgin Janggut (Utomo dkk, 2005:176).

Di sinilah fondasi awal peletakan kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam. Fondasi dasar Kesultanan Palembang Darussalam terus dibangun hingga Sultan Mahmud Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714), dan Sultan Agung Komaruddin Sri Truno (1714-1724). Pada masa ini, oleh beberapa penulis Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam merupakan masa pertengahan (Hanafiah,1989:27).

Bangkitnya pembangunan secara nyata dan membawa kepada kemakmuran rakyat terjadi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau lebih dikenal SMB I. Ia berkuasa pada tahun 1724-1758, pada masanya dibangun Masjid Agung, makam Lemabang, dan kuto tengkuruk. Ia Juga membangun Keraton Kuto Besak, sehingga ia lebih dikenal dengan “Bapak Pembangunan”. Keberhasilannya kemudian dilanjutkan oleh Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo atau dikenal Sultan Ahmad Najamuddin I (1758-1776) (Mahmud, 2004:47).

Pemerintahan Susuhunan Ahmad Najamuddin I, tidak mengalami perubahan yang besar. Ia hanya melanjutkan keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin I hingga akhir hayatnya. Setelah Ia wafat, kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin, terjadi perubahan ekonomi dan budaya, sehingga kemakmuran rakyat dapat dirasakan. Di bidang budaya, Palembang menjadi pusat

kebudayaan dan pusat syiar agama Islam di kawasan belahan Barat Nusantara. Melalui sastra Melayu menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di seluruh Nusantara (Utomo dkk,2005:191). Hingga akhir hayatnya, rakyat Palembang merasakan masa-masa keemasan. Rakyat mengalami kemakmuran, keamanan terjaga, ilmu pengetahuan Islam menjadi berkembang. Wafatnya Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Raden Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821). Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan sultan terakhir Kesultanan Palembang Darussalam (Safwan,2004: 26).

Mengamati sistem Kesultanan Palembang Darussalam yang berbentuk monarki, dapat disimpulkan bahwa pemimpin politik atau elit politiknya merupakan golongan bangsawan. Golongan bangsawan dan elit ini adalah pemegang kekuasaan berdasarkan “wahyu Tuhan”, sebagai dasar karisma dan legelitas. Para bangsawan yang setia mempunyai kesempatan menjadi pembantu raja. Dasar kesetiaan dan kepercayaan ini diimbangi pula dengan orang-orang yang paling dekat (keluarga) dengan raja (Hanafiah,1995: 172).

Hubungan raja dengan pembantunya, yaitu golongan elit atau bangsawan, diuraikan oleh Onghokkam yang dikutip oleh Hanafiah (1995:173):

“Biarpun dalam teori raja adalah penjelmaan kehendak Tuhan, namun, dalam prakteknya perintah raja tidak dapat demikian saja dituruti dan ditaati oleh rakyat, perlu ada penghubung. Raja tetap memerlukan aparat, suatu golongan yang di Jawa disebut priyayi yang melaksanakan kebijakannya atau yang memerintah rakyat untuk kepentingan raja.” “... Golongan priyayi (elit) merupakan kawula raja yang langsung. Rakyat biasa bukan kawula raja, tetapi tunduk dan takluk kepada masing-masing pejabat yang dituntut rakyat.”

Kemungkinan bukan golongan bangsawan (elit) dapat saja menduduki jabatan karena dedikasi dan loyalitas kepada raja. Untuk lebih mengangkat kesetiaan ini diikat dengan lembaga perkawinan dengan kerabat raja. Kondisi ini melahirkan lembaga kebangsawanan yang bertingkat atau berjenjang. (Hanafiah,1995:173). Merekalah yang

kemudian digolongkan para elit dan memiliki peran politik di Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pembuat kebijakan dan pengatur rakyat.

Adanya tingkatan golongan elit kesultanan, melahirkan perubahan sosial di masyarakat. Menurut teori elit yang dikemukakan oleh Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: *pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). *Kedua*, lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah (Varma,1987:202).

Elite berkuasa adalah elite yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta menjalankan kontrol (pengawasan) politik. Para elit menjadi komunikator utama yang mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi, sekaligus mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir secara vertikal dan horizontal. Elite berkuasa (elite pemerintah) ini selalu menjalin komunikasi dengan elite masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat kedudukannya (Varma,1987:205-206).

Dalam hal menjalin komunikasi, elit penguasa Kesultanan Palembang Darussalam menjalin komunikasi dengan elit masyarakat sebagai upaya mendapatkan legitimasi dan memperkuat kedudukan dilakukan dengan cara kompromi. Konsep pemerintahan ala Jawa berlaku hanya di pusat pemerintahan, yaitu ibu kota. Di luar ibu kota apa yang disebut “*macanegara*” diatur secara kompromistis.

Sikap kompromistis dan status *quo* penguasa (elit politik) Palembang tercermin dengan diberlakukannya *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Undang-undang ini sebagai pedoman yang mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi para elit, bukan dimaksud sebagai hukum positif. Isi undang-undang ini lebih banyak mengatur pergaulan sosial di daerah pedalaman. Menurut J.W. van Royen bahwa sultan-sultan

tidak berbuat lain daripada mengukuhkan hukum adat yang berlaku (Hanafiah,1995: 170).

Sikap penguasa Kesultanan Palembang, juga dijelaskan oleh P. de Roode Faille (1971: 40) dalam bukunya “Dari Zaman Kesultanan Palembang” bahwa:

Orang Pasemah bukan se-mata2 orang2 bawahan, mereka lebih merupakan kawan2 seperjuangan dari Sultan jang dilindunginja, meskipun mereka, seperti terbukti dari piagam Ratu Susuhunan, telah menerima penjagaan batas (sindang) sebagai tugas dan mengikat diri untuk mentaati beberapa peraturan jang menundjukan kepada pengakuan daripada kekuasaannja. Bukan sadja orang2 Pasemah harus berurusan dengan kepalanja sendiri (tidak ada bukti adanja djenang2 dari Sultan), tetapi merka adalah benar2 kepala2 ra’djat jang bebas, tidak mempunjai kewadjiban untuk membayar upeti (mardika): baru kemudian rupa2nja kepada sementara di antara mereka diwadjibkan “tiban-tukon” sebagai tanda radja.”

Penduduk wilayah ini bertugas menjaga batas-batas kerajaan. Penduduk wilayah ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Mereka ini merupakan orang yang merdeka dan dianggap sebagai teman raja. Hal yang dianggap sebagai suatu kewajiban adalah melakukan *seba* kepada raja yang dilakukan setidaknya tiga tahun sekali ke Palembang. “Kewajiban” ini merupakan suatu kebiasaan adat di kalangan penduduk asli (pribumi) untuk saling berkunjung dengan membawa buah tangan (Utomo dkk,2005:174).

Dalam kasus ini, Mosca percaya dalam setiap masyarakat, elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilinya sebagai konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin, kepercayaan-kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima. Kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan kelas penguasa, meskipun dirumuskan sesuai dengan kepentingannya sendiri, dikemukakan dalam bentuk yang sebaliknya dengan memberikan kepuasan moral dan hukum yang terkemas di dalamnya (Varma,1987:205-206).

Menurut Mosca, masyarakat tentu membutuhkan dan mendambakan suatu perasaan yang dalam akan pemenuhan tuntutan manusiawinya bahwa orang harus diperintah atas dasar prinsip moral dan bukan sekedar dengan paksaan fisik. Inilah faktor yang mendukung pengintegrasian lembaga-lembaga politik, rakyat, dan peradaban. Oleh karenanya Mosca memahaminya sebagai suatu instrumen kohesi moral (Varma,1987:205-206).

Terintegrasinya lembaga-lembaga politik, rakyat dan peradaban sebagai suatu instrument kohesi moral. Melahirkan kehidupan yang sangat harmonis, pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam didasarkan atas syariat Islam dan Undang-Undang Simbur Cahaya. Pada masa ini, jarang ditemukan adanya konflik horizontal antara elit Kesultanan Palembang dengan rakyat. Walaupun ada, konflik yang muncul dapat diselesaikan dengan kompromi sehingga tidak mengganggu stabilitas Kesultanan Palembang.

Ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Kesultanan Palembang Darussalam bukanlah tanpa alasan yang mendasar. Mengutip pandangan Ali Abdur Raziq, mengenai hal tersebut merupakan keberhasilan elit khilafah (kesultanan) menyebarkan konsep bahwa mematuhi khalifah berarti mematuhi Allah dan melawan khalifah sama dengan melawan Allah. Kemudian istilah ini dikenal “bayang-bayang Tuhan dan wakil-Nya di muka bumi” (*zillullah filal-ardh*) (Iqbal dan Nasution,2010:121). Keberhasilan Kesultanan Palembang Darussalam menyebarkan konsep *zillullah filal-ardh*, telah menafi’kan konsep pergantian (sirkulasi) elit yang dikembangkan Pareto. Menurutnya, individu-individu dari lapisan bawah (masyarakat) yang membentuk kelompok elit baru dan masuk dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Varma,1987:205-203).

Di sisi lain konsep pergantian elit yang dikembangkan Pareto juga mengemukakan bahwa pergantian elit dalam kancah perebutan kekuasaan dilakukan

oleh kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri (Varma,1987:205-203). Dalam kasus aristokrasi Kesultanan Palembang Darussalam hal ini tidak dapat dibantahkan. Keberhasilan Sultan Muhammad Bahauddin membangun perekonomian di Palembang menimbulkan konflik dari para elit dan para bangsawan berupaya memperebutkan posisi Kesultanan Palembang Darussalam.

Dampaknya ketika Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin Sultan Mahmud Badaruddin II, selalu disibukkan oleh konflik para elit politik. Upaya para elit untuk memperoleh kedudukan dan memperebutkan posisi dan kekuasaan atas wilayah kesultanan dilakukan dengan berbagai cara. Kondisi ini sering menimbulkan konflik kepentingan dan persaingan kekuasaan antara raja dan priyayi (elit). Meskipun kehidupan keraton menjamin kehidupan enak dan beradab, namun elit ini sering bermain politik (Hanafiah,1995:173) dan dalam hal ini peran antara elit di dunia politik yang menghalalkan segala cara dan saling menjatuhkan serta memojokan elit lain yang dianggap musuh sehingga menimbulkan bencana di keraton.

Masa Sultan Mahmud Badaruddin II, konflik elit politik ini memang tidak pernah kunjung selesai hingga jatuhnya kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan elit politik Belanda. Dalam catatan sejarah, pengkhianatan para bangsawan (elit) seperti pengkhianatan oleh saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Sultan Ahmad Najamuddin II, ia bersekutu dengan elit politik Inggris. Ia dijanjikan menjadi sultan di Kesultanan Palembang. Sedangkan bersekutu dengan Belanda untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II. Ia dijanjikan pula untuk mengangkat anaknya Prabu Anom sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin IV, sedangkan ia menjadi Susuhunan (Hanafiah,1986:17).

Kesetiaan para elit politik Kesultanan Palembang Darussalam mengalami gelombang pasang surut. Kehidupan yang serba cukup dan mewah tidak membuat para bangsawan (elit) ini merasa cukup dengan kedudukannya (Hanafiah,1995:173).

Berbagai cara untuk memperoleh kedudukan yang dicita-citakan. Bahkan tanpa memandang ikatan keluarga para elit ini terus bersaing dan saling menjatuhkan. Sering kali konflik ini muncul kepermukaan dan menimbulkan gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan kedudukan yang sah.

Konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam menjadi sangat kompleks dan krusial ketika para elit pedagang asing seperti Belanda dan Inggris ikut campur serta memberikan pengaruh politiknya di Kesultanan Palembang Darussalam. Persaingan di antara bangsa-bangsa Barat dalam perdagangan rempah-rempah dan timah yang berasal dari Palembang sering membangkitkan api peperangan. Pada umumnya latar belakang perselisihan ialah untuk memperoleh hak monopoli (PemProv,1986:28).

Kehadiran kolonial Belanda dan Inggris sebagai pedagang, melahirkan elit baru di masyarakat dan menjadi elit tandingan (*the ruling elite*) bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Akibatnya keseimbangan masyarakat pun terganggu dan menyebabkan semakin terpisahnya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat (Varma,1987:205-203).

Kolonial Belanda dan Inggris sebagai elit baru, telah mendukung kebenaran teori elit yang dikemukakan oleh Pareto bahwa masyarakat terdiri dari 2 kelas: *pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). *Kedua*, lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. (Varma,1987:202). Sebagai elit baru kolonial Inggris dan Belanda berkedudukan sebagai elit yang tak memerintah.

Adanya elit baru di Kesultanan Palembang Darussalam turut melahirkan pertentangan antar elit. Pertentangan kelompok (elit) didasarkan atas dikhotomi pembagian wewenang dalam perserikatan yang dikoordinasi secara memaksa dapat ditaruh sebagai asumsi dasar. Asumsi ini ditambahkan sebuah proposisi bahwa posisi

yang dilengkapi dengan wewenang yang berbeda dalam perserikatan menyebabkan pertentangan kepentingan orang yang memegangnya. Pemegang posisi dominan dan pemegang posisi yang ditundukkan, berdasarkan posisinya itu mempunyai kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan pelaksanaannya (Dahrendorf,1986:212).

Pertentangan antara elit penguasa Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial (Belanda dan Inggris) telah terjadi diawal pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Wewenang yang berbeda dalam perserikatan menyebabkan pertentangan kepentingan yang memegangnya. Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pemegang wewenang dominan memiliki kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya. Sedangkan kepentingan berbeda dengan kolonial yang memiliki kepentingan memonopoli perdagangan di wilayah kesultanan.

Kolonial Inggris dan Belanda sendiri berupaya untuk memonopoli perdagangan dengan berbagai cara baik secara diplomatik maupun secara penaklukan atau perang. Diplomasi yang erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negoisasi dengan cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya (Roy,1995:5).

Berkuasanya Sultan Mahmud Badaruddin II, ia berupaya untuk melakukan negoisasi dengan kolonial Belanda mengenai pelunasan kontrak dan pengisian timah di Bangka. Akan tetapi, upaya tersebut mendapatkan respon negatif dari kolonial Belanda. Belanda menganggap sikap Sultan Mahmud Badaruddin II adalah sebuah sikap menentang kolonial. Belanda mengancam bertindak Kesultanan dengan akan diturunkannya harga timah putih dan Palembang akan digempur (PemProv,1986:31). Di lain pihak, muncul kolonial Inggris yang ikut dalam percaturan perdagangan timah putih.

Persaingan dan perebutan pengaruh dikalangan kedua kekuatan kolonial tersebut adalah mengenai masalah perdagangan monopoli timah dan lada. Thomas Stamford Raffles yang menjadi wakil gubernur Inggris yang berkedudukan di Malaka mencoba mempengaruhi Sultan Mahmud Badaruddin II. Dengan perantara surat, dia menganjurkan supaya Sultan mengenyahkan kekuasaan Belanda di Palembang, kemudian melakukan perjanjian pada Inggris (Amin,1986:105).

Keadaan politik Kesultanan Palembang Darussalam mengalami kekacauan akibat adanya pertentangan para elit. Pertentangan yang timbul akibat kepentingan-kepentingan para elit mengalami puncaknya ketika meletusnya perang loji di Sungai Aur. Konflik yang muncul dapat diintegrasikan kembali. Tanggal 18 September 1811, ditanda tangani lah “Perjanjian Tuntang” antara Belanda dan Inggris. Perjanjian tersebut mengenai akta penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Inggris. Setelah perjanjian tersebut Inggris memerintahkan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerahkan loji Sungai Aur dan menuntut agar Sultan menyerahkan sepenuhnya tambang-tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung (PemProv,1986: 33). Kekuasaan kolonial Inggris tidak berlangsung lama. Berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda tanggal 13 Agustus 1814, Belanda mengambil kembali daerah-daerah yang pernah didudukinya oleh Inggris. Tanggal 10 September 1816 dengan terjadinya penyerahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda. (PemProv,1986:40).

Setelah kembali menduduki wilayah Kesultanan Palembang Darussalam kolonial Belanda kembali mengancam kedaulatan kesultanan, akibatnya terjadi konfrontasi fisik antara kedua pihak yang bertikai. Tercatat, Kesultanan Palembang Darussalam pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) mengalami tiga kali peperangan yang besar yaitu perang 12 Juni 1819 M pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Idelir Muntinghe, perang 9-21 Oktober 1819 M pasukan Belanda dipimpin oleh Schubert dan Walterbeek dan perang 9 Mei 1821 M dipimpin oleh Markus de

Kock (Aly,1968: 155). Dalam konfrontasi fisik ini, Kesultanan Palembang Darussalam berhasil mengalahkan kolonial Belanda pada perang Menteng dan perang babak II tahun 1819. Tahun 1821 Kesultanan Palembang mengalami kekalahan dan wilayah kesultanan menjadi koloni Belanda.

Selama berlangsungnya perang yang diakibatkan oleh eskalasi konflik elit politik antar bangsawan dan elit politik Kesultanan Palembang dengan kolonial, banyak menimbulkan korban yang berjatuhan di kalangan elit bangsawan itu sendiri dan anggota masyarakat yang justru tidak terlibat dalam pertentangan kedua pihak, tentu saja keadaan ini semakin dramatis, karena saling berhadapan dan saling bunuh ialah mereka yang masih mempunyai tali perhubungan, baik sebagai keluarga dekat –bahkan ada yang bersaudara kandung- sebagai rekan, sahabat dan semacamnya.

Konflik elit politik memang tidak dapat dihindarkan selama sistem politik masih berjalan. Perebutan kekuasaan, prestise dan kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan konflik elit politik bukanlah alibi dasar bagi munculnya konflik. Sangat tidak berimbang jika hanya untuk memperoleh kekuasaan, prestise dan menguasai monopoli harus mengorbankan putusnya ikatan kekerabatan serta hilangnya nyawa rakyat yang tidak terlibat dalam konflik para elit tersebut. Menurut penulis pasti ada nilai strategis yang menimbulkan adanya konflik. Asumsi awal penulis, nilai strategis itu terkait dalam hal perekonomian dan politik. Oleh karena itu, perlunya pengkajian yang mendalam mengenai nilai strategis yang menjadi penyebab timbulnya konflik di kalangan elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial.

Dari berbagai latar belakang dan alasan di atas, menumbuhkan minat penulis untuk memilih subjek penelitian dan penulisan dengan judul **“Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821.”**

Rumusan dan Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas yang menjadi masalah pokok penelitian adalah Bagaimana konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam 1803-1821? Untuk mempermudah permasalahan pokok tersebut maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam?
2. Bagaimana konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam?
3. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam?

Peristiwa yang diteliti untuk kemudian ditulis ini berlokasi di Palembang Sumatera Selatan. Pembatasan yang jelas diperlukan karena suatu penelitian akan bermanfaat jika dilakukan secara terbatas. Dengan mengambil setting geogografis maka diperoleh batas-batas kronologis dan kebudayaan secara jelas (Gonggong,1998:6-7).

Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam.
2. Untuk mengetahui konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam.
3. Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam.

Kegunaan Penelitian

Umumnya penggunaan penelitian untuk dua kepentingan yaitu untuk pengembangan ilmu dan *problem solving*, maka kegunaan penelitian ini terdiri dari:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi sejarah mengenai konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam serta memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat

Palembang, khususnya mengenai sejarah lokal dalam peperangan melawan kolonial Belanda dan Inggris. Selain itu, menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah lokal mengenai Kesultanan Palembang Darussalam.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:
 - a. Memberikan penjelasan mengenai elit politik dalam perannya di Kesultanan Palembang Darussalam, serta upaya-upaya atau strategi mereka dalam memperebutkan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam.
 - b. Memberikan uraian mengenai situasi dan kondisi politik Kesultanan Palembang Darussalam dan konflik elit politiknya dalam upaya untuk memerebutkan tahta atau kekuasaan.
 - c. Memberikan Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat konflik elit politik Kesultanan Palembang Darussalam.

Tinjauan Pustaka

Studi atau kajian terdahulu tentang Kesultanan Palembang Darussalam dapat dinyatakan masih langka, walaupun telah ada beberapa penelitian tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Namun pembahasannya belum tuntas secara konferensif. Di tengah kelangkaan sarjana yang menjadikan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai subjek penelitian, terdapat juga sarjana yang menjadikan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai subjek penelitian. Berikut diinformasikan tentang penelitian terdahulu tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Tahun 1971, seorang sarjana Belanda menjadikan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai subjek penelitiannya, yaitu De Roo De La Faile dengan judul *Dari Zaman Kesultanan Palembang Darussalam*, yang diterbitkan oleh Bhratara. Penelitiannya yang secara khusus mengkaji Kesultanan Palembang Darussalam dengan pendekatan kajian *historis*. Penulisan ini memberikan sumbangsi penting bagi Kesultanan Palembang Darussalam, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga

aspek penting yaitu mengungkapkan aspek politik kerajaan-kerajaan di Indonesia, adanya ciri khas Kesultanan Palembang Darussalam sebagai kerajaan maritim dan aspek dari corak hubungan dan konflik antara Kesultanan Palembang Darussalam saat munculnya kekuatan senjata dan ekonomi dari Belanda.

Hasil tesis Eka Martini tahun 2008 dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul *Kesultanan Palembang Darussalam: Studi Kasus Pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin III* dari judulnya dapat diketahui penulis ini secara khusus meneliti adanya dualisme kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin III yaitu R. M. S. Prabu Diraja dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III dan Raden Mahmud Badaruddin dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Secara *genealogi*, kedua sultan merupakan keturunan dari penguasa Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pengkaya pelestarian kebudayaan.

Karya Retno Purwanti yang berjudul *Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang: Tinjauan Tata Letak Makam Sultan Palembang* tahun 2004, hasil penelitian dari Balai Arkeologi Palembang dengan pendekatan arkeologi ini secara khusus meneliti konflik elit politik Kesultanan dengan mengkaji makam sebagai subjek penelitian. Makam kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam tidak berada dalam satu kompleks melainkan tersebar di wilayah Palembang. Hal ini menunjukkan adanya konflik elit politik di tubuh kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam.

Tidak hanya hasil penelitian dengan subjek Kesultanan Palembang Darussalam, akan tetapi kajian penelitian lainnya yang dianggap relevan dengan tema penulisan juga menjadi referensi bagi penulis. Hasil penelitian Hariyono Renardi dengan judul *Konflik Elit Politik Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan: Munculnya Dekrit Wapres No X 16 Oktober 1945* diterbitkan tahun 2007. Jurnal yang bersifat historis yang menguraikan sikap para elit politik pada masa awal kemerdekaan terhadap munculnya

keterkaitan asing dan masih adanya rasa takut atas kediktatoran dan totaliter warisan Jepang yang masih melekat pada diri elit politik Indonesia.

Uraian di atas secara tidak langsung memberikan gambaran politik dan sikap para elitnya dalam konflik yang muncul atau dimunculkan serta uraian dengan kajian *historis* mengenai politik Kesultanan Palembang Darussalam. Tetapi, hasil penelitian tersebut belum ada kajian khusus tentang konflik elit politik Kesultanan Palembang Darussalam mengenai perebutan kekuasaan tahun 1803-1821.

Landasan Teori

Pilihan terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk menggarap suatu subjek penelitian tentu tidak dengan sendirinya dapat digunakan bagi peneliti subjek yang lain. Karena itu, peneliti yang bersangkutan perlu memeriksa bahan-bahan secara seksama agar memperoleh kejelasan untuk menentukan teori yang digunakan.

Teori struktur fungsional menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan jaringan dari bagian-bagian yang saling terkait, setiap bagian menyumbang pada pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Masyarakat pada dasarnya akan selalu bergerak ke arah interaksi yang mempersatukan (*integrative*). Integrasi merupakan bentuk dasar interaksi masyarakat (Dahrendorf, 1986:199).

Meskipun integrasi merupakan bentuk dasar masyarakat, namun tidak berarti dalam masyarakat tidak ada ketegangan-ketegangan antarwarga. Karena berbagai sebab, ketegangan dan konflik akan terus terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, ketegangan dan konflik tersebut akan lenyap. Masyarakat akan kembali berada dalam keseimbangan. Hal ini terjadi karena dalam setiap sistem sosial terdapat konsensus atau kesepakatan di antara warga masyarakat mengenai nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi sistem sosial. Konsensus itulah yang menjadikan warga masyarakat memiliki komitmen untuk mengatasi perbedaan dan konflik mereka.

Teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat ternyata mendapat kritikan tajam dari ahli sosiologi. Persons sebagai tokoh pengusung teori struktural fungsional memberikan asumsi-asumsi mengenai ketertiban dan keserasian, maka setiap gejala yang tidak tertib dan tidak serasi dengan mudah digolongkan ke dalam kategori abnormal atau patologis. Asumsi inilah kemudian mendapat kritikan tajam, menurut Lockwood mekanisme-mekanisme yang menyebabkan terjadinya konflik tidak dapat dicegah. Misalnya dalam kasus sejarah pertentangan antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial, perbedaan taraf kekuasaan yang dipegang berbagai kelompok di masyarakat, merupakan sumber-sumber ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Tersedianya sumber-sumber daya yang terbatas akan menimbulkan pertikaian untuk memperebutkan sumber-sumber daya tersebut. Kelompok-kelompok (para elit) dalam masyarakat tidak selalu mempunyai kepentingan yang sama dan serasi, sehingga merupakan potensi bagi timbulnya konflik (Soekanto dan Lestarini,1988:65).

Kegagalan teori struktural fungsional memberikan kepuasan terhadap permasalahan, pertentangan dan konflik di masyarakat, melahirkan teori konflik. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan (Dahrendorf,1986:195).

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan *power* (Dahrendrof, 1986:193-194).

Dalam hubungannya dengan dominasi, koersi, dan *power* pada kasus para elit Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial dapat digunakan pemahaman Louis Coser yang dikutip oleh Decki Natalis dan Pigay Bik (2000:70) :

“Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.”

Selain itu, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain: *Pertama*, Konflik menurut K Lorenz adalah merupakan suatu unsur sosial yang alami. *Kedua*, Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain. *Ketiga*, Dahrendrof melihat bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaanya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan. Untuk itu, di manapun

manusia membentuk suatu ikatan sosial di situ akan terdapat konflik. *Keempat*, Dari sisi Marxisme, konflik di sebabkan oleh kepemilikan harta benda (Schroder,2003:359)

Sehubungan dengan itu, penelitian yang subjeknya menyangkut konflik elit politik. Maka perlu suatu pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan konflik itu. Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan (Poerwodarminta,2000:461). Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa (Nasikun,2005:21). Menurut Webster menyatakan bahwa:

“Istilah “*Conflict*” di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal (Pruitt dan Rubin, 2004:19).”

Hal lain yang tampak dari sebuah konflik ialah sifat konfrontansi yang merupakan tingkah laku individu yang bermaksud untuk memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka. Pada umumnya sifat konfrontatif berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang yang disebut agresif. Artinya situasi yang dihadapi oleh individu melahirkan hambatan terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Dalam kaitannya dengan konsep konfrontansi fisik dikembangkan teori tentang “keterelakan sejarah” atau “hal-hal yang secara historis tak terelakkan.” Teori ini dikembangkan oleh Marx berdasarkan tesis, antitesis dan sintesis. Marx berdasarkan teorinya pada konflik material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan, menurutnya:

“Ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan ketergantungan, melainkan konflik dan persaingan. Setiap masyarakat baik di masa lalu maupun di masa sekarang ditandai dengan konflik sosial yang dimaksud adalah konflik antara

kelas kapitalis, kaum borjuis yang memiliki sarana-sarana produksi (majikan), dengan kelas pekerja yang ter-*ekspolitas* dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana-sarana produksi (Maran,2001:20).”

Teori konflik yang bertolak dari material dan ekonomi, kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk melakukan penelitian, khususnya di dalam permasalahan konflik elit politik. Sehubungan dengan pemahaman tersebut , Louis Coser yang dikutip oleh Decki Natalis Pigay Bik (2000:70) memberikan definisinya :

“Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.”

Selain itu, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Dari definisi dan teori yang dikemukakan di atas, terdapat dua tujuan dasar konflik yakni tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat materil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah agar dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat, yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber ekonomi yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut, yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka

dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Surbakti,1999: 155).

Konflik elit politik terbentuk karena adanya penguasa politik. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai penguasa politik artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik politik. Dalam hal ini konflik politik yang terutama adalah konflik antar penguasa politik dalam melihat objek kekuasaan politik. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat dinilai sulit didapat. Konflik dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan bermanfaat untuk meramalkan apa yang dilakukan orang. Hal ini disebabkan persepsi yang biasanya mempunyai dampak yang bersifat segera terhadap perilaku (Pruitt dan Rubin,2004:27).

Berdasarkan definisi Webster, Pruiit dan Rubin (2004:9-10) juga memberikan pengertian konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dari pengertian tersebut dapat memberikan batasan bagi penulisan tesis ini, dengan mengetahui asal mula terjadinya perbedaan kepentingan seperti yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang berkonflik dan dampak persepsi terhadap pemilihan strategi serta hasilnya. Dengan mengetahui aspek psikologis di balik konfrontasi fisik maka akan lebih mudah bagi penulis menemukan akar masalah dalam konflik di Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga perlu adanya penekanan bahwa konfrontasi fisik dalam tesis ini merupakan akibat dari eskalasi konflik itu sendiri.

Selain pemahaman makna dan teori konflik dalam meneliti konflik elit politik, maka diperlukan juga pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan elit politik. Elit merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan). Dalam kajian ini penulis mengkatagorikan elit politik ke dalam dua kelompok yaitu, *pertama* elit politik memerintah (*governing elite*) merupakan seseorang yang menduduki jabatan-

jabatan politik (kekuasaan), seperti khalifah, raja, sultan, presiden, gubernur, dan lainnya. *Kedua*, elit politik memerintah (*governing elite*) adalah seseorang yang tidak memiliki jabatan dalam kekuasaan namun menduduki posisi strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Duverger, 1987:179). Dari teori di atas yang dimaksud dengan elit yang memerintah (*governing elite*) dalam penelitian ini adalah Sultan, Pangeran, depati, dan jabatan di kerajaan lainnya. Sedangkan elit politik tidak memerintah (*non-governing elite*) adalah kolonial Inggris dan Belanda.

Perbedaan tipe elit ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit politik dalam proses perebutan kekuasaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*) (Duverger, 1987:179).

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas

dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Varma,1987:203).

Dalam sirkulasi elit yang disebutkan oleh Masco, terutama karena terjadinya “penjatihan rezim”, konflik pasti tidak terhindarkan, karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti organisasi dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya (Varma,1987:275).

Dari uraian di atas, maka arah penelitian ini secara teoritis dan konseptual adalah fokus kepada penelitian konflik elit politik dalam konteks Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial.

Definisi Oprasional

Menurut Moh. Nazir (2005:126) definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan judul penelitian “**Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821**”, maka variabelnya meliputi, konflik dan elit politik.

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan (Poerwordaminto,2000:461). Menurut Webster, istilah “*Conflict*” di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik

konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep. Dengan demikian konflik diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin,2004:9).

Secara umum konflik (Nasikun,1995:21) dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama. Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (*Non-Zero Sum Conflict*) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (*Zero- Sum Conflict*) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri (Dahrendorf,1986:210-222).

Dari uraian di atas mengenai definisi konflik, konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak ditemukannya jalan keluar dalam mengambil keputusan dan kepentingan, sehingga menimbulkan pertentangan. Pada akhirnya timbulnya upaya untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya.

Elit politik merupakan gabungan dua kata yaitu elit dan politik. Elit secara bahasa merupakan orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok (Muda,2006:200), sedangkan politik merupakan hal-hal yang berkenaan dengan tata

negara atau urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara atau negara lain (Muda,2006:425). Kemudian dapat disimpulkan bahwa elit politik adalah orang yang terbaik yang mampu mengurus dan paham mengenai tata negara.

Selanjutnya makna elit menurut Pareto yang dikutip Varma (1987:202) merupakan orang-orang yang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Berangkat dari definisi di atas, Pareto membagi dua kelompok elit politik yaitu kelompok elit memerintah dan elit tidak memerintah. Kelompok elit memerintah adalah kelompok elit yang memiliki kekuasaan, wewenang dan kebijakan dalam mengatur masyarakat, sedangkan elit tidak memerintah merupakan kelompok elit yang tidak memiliki peran dalam pemerintahan tetapi memiliki pengaruh di masyarakat. Dari pengertian tersebut yang dimaksud elit politik dalam penelitian ini merupakan elit politik yang memerintah dan *non* pemerintah. Elit pemerintah adalah kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, sedangkan kelompok elit tidak memerintah adalah kelompok kolonial Belanda dan Inggris.

Setelah variabel-variabel di atas telah diketahui definisinya maka penelitian yang berjudul “Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821”, maka penelitian ini berupaya untuk mengkaji adanya pertentangan akibat kebuntuan dari permasalahan antara elit Kesultanan Palembang Darussalam sendiri dan dengan kolonial Belanda dan Inggris dalam merebut kedudukan strategis yang mampu mempengaruhi masyarakat dari kedudukan tersebut yang terjadi antara tahun 1803-1821.

Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah teks-teks tertulis yang menerangkan atau mengandung gagasan tertentu. Dengan demikian jenis data yang

digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis (Moleong,1991:3). Karena itu, berdasarkan jenis data dan tema penelitian yang akan digarap maka jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*).

Dilihat dari siapa dan kapan menyampaikan terdapat sumber sejarah primer (*primer sources*) dan sumber sejarah skunder (*secondary sources*). Sumber primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyewitness*). Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah (Daliman,2012:55). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa seperti naskah Syair Perang Menteng dan Silsilah Kesultanan Palembang Darussalam.

Berbeda dengan sumber primer, sumber skunder merupakan sumber yang bukan berasal dari orang yang hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa, tetapi melaporkan apa yang terjadi berdasarkan kesaksian orang lain. Namun bukan berarti bahwa sumber sekunder tidak penting. Sumber sekunder sangat berguna untuk memahami secara tepat dan mendalam mengenai latar belakang sumber-sumber dan dokumen yang sezaman (Daliman,2012:55). Dalam penelitian ini sumber sekunder yang digunakan adalah semua bahan ditulis di jurnal, koran, buku teks yang berkaitan langsung dengan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan metode penelitian sejarah yaitu heuristik dan verifikasi.

Heuristik

Langkah awal dalam penelitian sejarah adalah langkah pengumpulan sumber data (Heuristik). Heuristik adalah langkah berburu dan mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan data yang diteliti (Suryabrata,1997:65). Oleh karena itu, heuristik tidak

memiliki peraturan-peraturan umum. Heuristik merupakan keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan (Abdurahman.2012:104).

Berdasarkan jenis penelitiannya, laboratorium penelitian ini adalah perpustakaan, maka alat heuristik yang digunakan adalah katalog-katalog. Kegiatan katalog dilakukan dengan membaca bibliografis yang terkait dengan Kesultanan Palembang Darussalam pada Tahun 1803-1821. Akan tetapi, sumber tertulis itu tidak selamanya terkoleksi secara rapi. Ternyata sumber-sumber itu terdapat pada koleksi swasta atau perorangan, maka yang terpenting ialah dapat diketahui tempat-tempat atau dimana koleksi dokumen-dokumen itu tersedia (Abdurahman,2012:104-105). Adapun tempat-tempat yang akan peneliti kunjungi sebagai langkah heuristik seperti Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan UPT IAIN Raden Fatah, Perpustakaan UPT Unsri, Balai Arkeologi Palembang, dan tempat-tempat yang berhubungan langsung dengan data yang akan diteliti.

Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik adalah langkah berikutnya setelah langkah heuristik. Verifikasi adalah langkah yang mengkritik atau mengecek sumber data yang telah berhasil didapatkan. Untuk memperoleh sumber yang maksimal semua sumber yang diperoleh ditelaah dan dikritik langsung oleh penulis. Sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh masih perlu dikritik sebab sumber data sejarah berbeda dengan sumber data ilmu sosial lainnya. Penelitian sejarah tidak mungkin dilakukan dengan metode observasi langsung seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, karena peristiwa-peristiwa sejarah bersifat *einmalig* (sekali terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali). Data sejarah tidak pernah lengkap dan jarang pula terdokumentasi secara baik, walaupun ada data yang terdokumentasi biasanya hanya kebetulan saja. Bahkan tidak sedikit yang menghilangkan jejak sejarah,

dan masih banyak pula informasi sejarah bersifat bias dan berat sebelah (Daliman,2012: 65).

Data yang telah diperoleh dianalisis secara cermat, sehingga data yang dianggap memiliki kesenjangan karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran dari narasumber maupun pengarang buku dapat diambil jalan tengah untuk mencari kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, seorang sejarawan dituntut untuk tidak memihak atau condong terhadap pendapat atau pemikiran seseorang. Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, menyatakan bahwa:

“Seorang sejarawan harus membandingkan kesamaan-kesamaan atau membedakan keadaan-keadaan, kini dan masa lalu. Dia harus mengetahui sebab timbulnya kesamaan dalam beberapa situasi dan sebab timbulnya perbedaan dalam situasi lainnya. Dia harus mengetahui perbedaan sumber dan permulaan timbulnya alasan dan dorongan yang membuat semua ini terbentuk (Khaldun,2000: 96).”

Mengutip pendapat Garrachan (1964,205) dalam bukunya yang berjudul “ *A Guide to Hisrorical Method*” bahwa:

“The dissection of historical writing with a view to ascertain the sources of information from which they were compiled, is a conventional method of inquiry in scientific history. The proses must be conducted with meticulous care. For credibility of a narrative, as conditioned by the sources on with draws, is not necessarily a constant: it may fluctuate according to the credibility of the individual sources.”

dalam penjelasan di atas Garrachan memaparkan bahwa untuk melakukan kritik sumber haruslah dilakukan secara teliti dan hati-hati agar penulisan sejarah dapat ditulis secara ilmiah. Setelah memahami makna verifikasi di atas, langkah verifikasi yang dilakukan peneliti dalam mengkritik sumber data dilakukan dengan kritik eksteren dan interen.

a. Kritik Eksteren

Kritik eksteren merupakan kritik untuk menguji keabsahan tentang keaslian sumber (ontentitas). Peneliti mencoba menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan, sumber dokumen akan diteliti kertasnya, tintanya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya,

kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luarnya (Abdurrahman,2012:108). Penelitian *library research* memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan kritik eksternal. Sejumlah dokumen Kesultanan Palembang Darussalam yang diperoleh di perpustakaan dan musium sebagian besar telah dikaji dan diuji otentitasnya, diberi catatan, dikomentari serta diterbitkan sebagai buku-buku referensi yang siap digunakan. Demikian pula manuskrip yang telah mengalami penggarapan yang sama, diuji ontentiasnnya, diterbitkan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya (Daliman,2012:68).

b. Kritik Interen

Kritik interen bertujuan menyelusuri keabsahan tentang kesahihan sumber (*kredibelitas*). Kredibilitas sumber akan lebih tepat bila ditelusuri berdasarkan proses-proses kesaksian. Oleh karena itu, kritik interen dilakukan sebagai alat pengendali atau pengecekan proses-proses itu serta untuk mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi (Abdurrahman,2012:110-111).

Dalam proses ini sejarawan harus menentukan seberapa jauh dapat dipercaya (*credible*) kebenaran dari isi informasi yang disampaikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah. Karena sumber dan produk sejarah adalah produk manusia, maka kritik internal juga harus mampu mengidentifikasi pengarang suatu sumber atau dokumen.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data primer dan skunder untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah (Nazir,2005:174). Adapun teknik penelitian dalam

penelitian ini yang merupakan jenis *library research* adalah studi dokumen dengan kegiatan membaca sumber data, mencatat data, dan mengkategorikan data berdasarkan sub-sub pembahasan.

Membaca segala keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian sangat penting peranannya dalam studi penelitian kepustakaan. Menurut Wilson Jr yang dikutip Moh. Nazir (2005:103) memberikan dua tujuan utama membaca yaitu mencari apakah keterangan mengenai penelitian ada dan tersedia, dan untuk memperoleh latar belakang yang cukup dalam bidang penelitian.

Setelah sumber-sumber data selesai dibaca, kemudian sumber data yang dianggap relevan akan dicatat. Data penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka itu mustahil hanya dapat disimpan dalam ingatan semata, tetapi harus dibuat catatan-catatan dari sumber-sumber yang diperoleh. Menurut Florence M.A Hilbish terdapat tiga bentuk catatan yang dapat dibuat dalam penelitian yaitu, *quotation* (kutipan langsung), *citation* atau *indirect quotation* (kutipan tidak langsung), dan *summary* (ringkasan) dan *comment* (komentar) (Abdurahman, 2012:106).

Setelah data dibaca dan dicatat, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau mengkategorikan data tersebut berdasarkan sub-sub pembahasan. Langkah ini merupakan upaya mempermudah pengecekan kembali atas fakta maupun opini. Selain itu tujuan pengkategorian ini agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan hasil penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik Deskriptif Analisis

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

Analisis data mempunyai banyak variasi pendekatan, teknik yang digunakan dan nama atau sebutan bergantung pada tujuan dan bidang ilmu yang terkait (Usman,2004:74).

Setelah melalui langkah heuristik dan keritik sumber (verifikasi), selanjutnya yaitu teknik deksriptif analisis. Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan atau memaparkan gejala sosial, politik, dan ekonomi (Maman,2006:29), sedangkan analisa merupakan tahapan yang paling menentukan, karena dalam tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menjawab dan menyimpulkan persoalan dalam penelitian ini.

Penggunaan metode deskriptif-analisis terhadap penelitian mengenai konflik elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan Kolonial dalam perebutan kekuasaan tahun 1803-1821 merupakan upaya memaparkan politik Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial sebelum akhirnya mendeskripsikan konflik elit politiknya. Kemudian menganalisis dengan interpretasi tentang konflik yang terjadi dan peristiwa-peristiwa yang ditimbulkan akibat konflik elit politik.

Teknik Interpretasi

Langkah selanjutnya, dalam penelitian sejarah adalah langkah interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Mengenai hal tersebut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Abdurahman (2012:114) menjelaskan bahwa keduanya analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Analisis itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam satu interpretasi yang menyeluruh (Abdurahman,2012:114)

Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyikap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi jelaslah, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah itu memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian, peneliti akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu (Abdurahman,2012:115). Hasil dari interpretasi ini, terbentuklah susunan atau karangka yang siap untuk ditulis.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperkuat analisa akan digunakan pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan ekonomi politik (*economic-politic approach*), dan pendekatan sosiologis (*sosiologis approach*)

Pendekatan ekonomi politik yang dimaksud adalah bagaimana ekonomi politik yang dipahami dan dihayati. Sehingga ekonomi mampu menimbulkan konflik di kalangan elit politik. Menurut Merkantilisme pendekatan ekonomi politik merupakan pendekatan yang memandang bahwa elit-elit politik merupakan aktor utama dalam pembangunan negara (kesultanan). Pandangan utama dalam pendekatan Merkantilisme adalah ekonomi merupakan alat politik yang digunakan sebagai dasar kekuasaan politik. Sehingga para penganut Merkantilisme beranggapan bahwa kegiatan ekonomi harus tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat. Hal ini tentu tidak terlepas dari asumsi bahwa ekonomi merupakan alat politik bagi sebuah negara (Sorensen,1999: 232).

Selain pendekatan ekonomi politik, menelaah kasus tentang konflik elit politik dalam perebutan kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam dapat juga digunakan pendekatan sosiologi. Menurut Marvin E. Olsen yang dikutip oleh Dudung Abdurahman

(2012:13) di dalam perubahan sosial sering kali disertai suasana kegelisahan sosial, disintegrasi, dan konflik sosial. Bahkan antara konflik dan perubahan sosial itu sendiri, pada dasarnya merupakan dua proses yang jalin-menjalin atau mempunyai efek yang timbal balik.

5. Teknik Penulisan

Historiografi

Langkah akhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Langkah akhir ini adalah langkah final dari rangkaian penelitian yang dilakukan. Sebagai tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa yang dituangkan. Dalam penulisan ini disusun berdasarkan kronologi atau peristiwa dan sebab akibat. Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi. Rekonstruksi sejarah akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis (Daliman, 2012:99).

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821” terdiri lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar belakang, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas peran elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821, meliputi sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, situasi dan kondisi

Kesultanan Palembang Darussalam sebelum tahun 1803-1821, dan peran elit politik Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821.

Bab III membahas konflik elit politik dalam perebutan kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821, meliputi konflik interen elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam, dan konflik eksteren elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam.

Bab IV membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821, meliputi peristiwa perang 1819 dan peristiwa 1821.

Bab V merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dari penulisan yang telah dilakukan dan jawaban dari masalah pokok yang menjadi sasaran penelitian serta dilengkapi saran sebagai masukan untuk meningkatkan penelitian mengenai kajian lokal.

BAB II

PERAN ELIT POLITIK DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

TAHUN 1803-1821

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam

Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam telah berdiri kerajaan terbesar di Asia Tenggara yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad ke 7. Pengetahuan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya baru lahir pada abad ke 20. Tahun 1913, Kern menerbitkan Piagam Kota Kapur yang berangka 686, ia menganggap bahwa nama Sriwijaya yang tercantum dalam piagam tersebut adalah seorang raja. Karena *cri* biasanya digunakan sebagai sebutan atau gelar raja, diikuti nama raja yang bersangkutan. Sejarah Sriwijaya sendiri baru mulai dikenal pada tahun 1918 sejak Goerge Coedes menulis karangannya *Le Royaume de Crivijaya* (Muljana,2006:2).

Terjemahan Piagam Kota Kapur oleh Kern, dimana terdapat nama Sriwijaya dan terjemahan karya I-Tsing dimana juga terdapat transkripsi Tionghua *Shih-Li-Fo-Shih* memungkinkan Coedes untuk menetapkan bahwa Sriwijaya adalah nama negara di Sumatera Selatan. Tetapi Coedes tidak berhenti pada penemuan itu saja. Ia berusaha menetapkan letak ibu kotanya di Palembang, hal ini berdasarkan hasil penelitian Groeneveldt dalam karangannya *Notes on the Malay Archipelago and Malaca Compiled from Chinese Source* tahun 1876 yang menyatakan bahwa *San-Fo-Ts'i* adalah Palembang (Muljana,2006:3).

Gabriel Ferrand mengatakan Kerajaan Sriwijaya berdiri sejak 392 M. Pendapat ini berdasarkan kronik Cina yang menyatakan tentang negeri bernama *She-ye* (*Cho-ye*) artinya jaya atau wijaya atau sriwijaya (Idi,2001:1). Dengan mengambil sudut pandang

yang berbeda, menyandarkan pada bukti arkeologi Piagam Kedukan Bukit, Coedes mengidentifikasi bahwa Kerajaan Sriwijaya yang dibangun oleh Dapunta Hyang bertanggal 5 Asada 604 Saka atau bertepatan dengan 16 Juni 683 (Tjandrasmita, 2009:81-82). Kontroversi mengenai kapan berdirinya Kerajaan Sriwijaya memang masih menjadi diskusi yang belum dapat diselesaikan oleh para sejarawan. Pertentangan ini muncul akibat ditemukannya data atau fakta baru yang masih belum diidentifikasi dalam merekonstruksi sejarah Kerajaan Sriwijaya.

Dalam menemukan benang merah dari permasalahan di atas, keberanian sejarawan atau peneliti menjadi dasar dalam merekonstruksi sejarah. Mengenai kasus di atas peneliti menganalisis dan kemudian diinterpretasikan bahwa dengan bertolak kepada pendapat Gabriel Ferrand Kerajaan Sriwijaya dibangun pada tahun 392, pandangan ini dapat diterima karena pada masa ini Kerajaan Sriwijaya telah melakukan hubungan bilateral dengan kerajaan di Cina. Keharmonisan hubungan bilateral ini kemudian dicatat di kronik. Menurut Slamet Muljana (2008,31) tarikh tahun 683 dalam Piagam Kedukan Bukit sebagai tahun proklamasi, hingga kini masih menjadi persoalan yang belum dipecahkan.

Terlepas dari semua kontroversi di atas, di masa kejayaannya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang kokoh. Sebagai kerajaan maritim yang kokoh, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut terkuat di masanya. Teknologi pembuatan kapal dan navigasinya sudah sangat maju. Kerajaan Sriwijaya dikenal juga sebagai pusat perdagangan internasional, kegiatan penelitian keagamaan (Budha), dan dapat pula dikatakan sebagai tempat pertemuan berbagai bangsa (*melting tops*) yang terintegrasi (Idi,2001:2).

Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra. Dengan penguasaan wilayah-wilayah tersebut menjadikan Kerajaan

Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara (Safwan,2004:9). Selain menguasai perdagangan di Asia Tenggara, hubungan perdagangan internasional Kerajaan Sriwijaya menghubungkan negeri-negeri yang berada di wilayah Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur Jauh melalui Selat Malaka. Hubungan pelayaran dan perdagangan menghubungkan tiga kerajaan besar sejak abad ke 7 yaitu Dinasti Tang di Cina, Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara dan Dinasti Umayyah di Asia Barat (Tjandrasasmita,2009:81).

Hubungan dagang yang terjalin, meninggalkan jejak-jejak sejarah dan arkeologis. Tidak mengherankan jika jejak peninggalan Kerajaan Sriwijaya banyak diberitakan oleh orang-orang Cina dan Arab. Walaupun pada masa “*golden age*-nya” diketahui memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang besar, Kerajaan Sriwijaya tidak meninggalkan naskah-naskah atau sastra sama sekali, kecuali sejumlah prasasti batu, kronik, atau keping tembaga (Mahmud,2004:4-5).

Selanjutnya hubungan dagang internasional ini, membuka jalur-jalur masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara masih menjadi diskusi panjang yang belum terselesaikan. Teori kedatangan Islam yang dikemukakan oleh Crawfrud menyatakan bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat Nusantara langsung dari tanah Arab pada abad ke 7 (Huda,2007:36). Teori ini juga didukung oleh Uka Tjandrasasmita (2000:17) dan Syed Naquib Al-Attas, dimungkinkan orang-orang Islam dari Arab, Persia, India sudah banyak berhubungan dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya jalur perdagangan internasional kala itu antara Dinasti Tang di Cina, Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara dan Dinasti Umayyah di Asia Barat. Teori berbeda yang diusung oleh Snouck Hurgronje menurutnya kedatangan Islam terjadi pada abad ke 13 dari Gujarat dengan ditemukannya bukti makam sultan Islam pertama Sultan Malikus Saleh seorang raja pertama Kerajaan Samudera Pasai (Susanto,2007:9).

Kedua teori tersebut memiliki landasan masing-masing dalam menyoroti kedatangan Islam. Dari kedua teori di atas menurut penulis dapat digunakan pendekatan ekonomi dan politik untuk menjawab perdebatan panjang tersebut. Islam dapat dikatakan masuk pada abad ke 7. Namun Islam dalam abad ini, baru masuk belum menjadi basis koloni dan agama rakyat. Pada abad ini, hubungan ekonomi antara Dinasti Umayyah dengan Kerajaan Sriwijaya, secara tidak langsung mengenalkan Islam ke Nusantara. Sebelum abad ke 13, Islam mulai berkembang banyak rakyat yang memeluk Islam. Kehidupan sosial masyarakat mulai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Islam mulai menunjukkan kekuatan politik terbesar di Nusantara. Setelah menjadi kekuatan politik yang tangguh, pada Abad ke 13 Islam telah mampu mendirikan organisasi pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai kesultanan dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kesultanan, itu artinya Islam telah menjadi agama rakyat. Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Taufik Abdullah yang membagi proses Islamisasi dalam tiga fase yaitu *de kosm* (datang) dipengaruhi motif ekonomi, *receptive* (penerimaan) didorong oleh motif agama dan *uitbreiding* (pengembangan) didorong oleh motif politik (Abdullah,1972:1).

Pendapat yang menyatakan bahwa telah Islam masuk ke Palembang pada abad ke 7 M, dimaksudkan sebagai proses datangnya Islam. Pada abad ke 7, Palembang masih merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya. Ketika itu Kerajaan Sriwijaya masih berdiri kokoh. Di masa itulah pedagang Islam dan bermukim di pelabuhan Palembang. Mereka diberi kesempatan menganut dan menjalankan ajaran Islam. Masa itulah menurut Naquib al-Attas sebagai awal datangnya Islam di daerah Palembang. Pendapat inilah kemudian menjadi salah satu kesimpulan seminar masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan pada November 1984 (Rahim,1998:50).

Selanjutnya, hubungan ekonomi antara Dinasti Umayyah dan Kerajaan Sriwijaya membuka jalur-jalur Islamisasi di Palembang yang kelak akan melahirkan

Kesultanan Palembang Darussalam. Secara tidak langsung Kerajaan Sriwijaya ikut serta dalam penyebaran Islam di Nusantara. Paling tidak Kerajaan Sriwijaya memberikan kebebasan beragama di wilayahnya. Akibat dibukanya jalur perdagangan internasional tersebut Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal tersebut membuat Kerajaan Sriwijaya patut diperhitungkan, sehingga banyak kerajaan yang melakukan hubungan kerja sama. Bentuk kerja sama ini tidak hanya menghasilkan keuntungan belaka, namun terdapat juga kerugian yang ditimbulkan (Safwan,2004:10).

Upaya memperkuat ekonomi, Kerajaan Sriwijaya melakukan hubungan dengan kerajaan di India. Kerajaan Pala diperkuat dengan hubungan agama yaitu Agama Budha, banyak pendeta dari Kerajaan Sriwijaya yang belajar di Perguruan Tinggi Nadala (India). Hubungan dilakukan juga dengan Kerajaan Chola. Hubungan persahabatan ini berubah menjadi permusuhan. Ketegangan tersebut dipicu oleh persaingan dalam bidang pelayaran dan perdagangan (Safwan,2004:11). Tahun 1025 Kerajaan Chola melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Sriwijaya, akibatnya Kerajaan Sriwijaya kehilangan hak monopoli atas lalu lintas perdagangan India-Cina (Mahmud,2008:4).

Setelah peristiwa ini, kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi mencoba menggantikan peran Kerajaan Sriwijaya dalam hubungan dagang dengan Cina, namun Cina tidak mengakuinya. Pada abad ke 13, Kerajaan Sriwijaya hanya terbatas di wilayah Palembang dan sekitarnya. Kemunduran kekuasaan dan lemahnya kekuatan Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Majapahit. Tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya harus mengakui dan tunduk kepada Kerajaan Majapahit (Safwan,2004:10).

Selepas penaklukan, ternyata Majapahit tidak dapat mengontrol wilayah Palembang dengan baik yang berakibat terjadinya dominasi oleh para saudagar dari

Cina (Tiongkok). Pengaruh kuat orang-orang Cina berakhir ketika raja Kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya V (wafat 1478) mengirimkan utusannya untuk memimpin Palembang, bernama Adipati Arya Damar (Abdullah,1986:42). Arya Damar berhasil menaklukan Palembang. Keberhasilannya menaklukan Palembang, kemudian ia dinobatkan menjadi raja dan memimpin tahun 1455–1486 untuk wilayah Palembang. Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya Arya Abdillah atau Ario Dillah. Tahun 1478, menjelang jatuhnya Kerajaan Majapahit, Ario Dillah memisahkan diri dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Palembang yang berdaulat (Aly,1986:130).

Kalau dikaji, ternyata tahun 1520 Kerajaan Demak telah berdiri di bawah Raden Fatah dan Kerajaan Majapahit telah dikalahkan oleh Demak. Ini berarti di masa akhir kekuasaan Ario Dillah di Palembang, secara tidak langsung tidak lagi berada di bawah pertuanan Majapahit, tetapi beralih ke Demak (Rahim,1986:44). Setelah Ario Dillah wafat, Palembang menjadi daerah perwakilan Kesultanan Demak bersama dengan Jambi. Akibatnya wilayah Palembang mengalami kekosongan pemerintahan, sedangkan situasi di Demak masih disibukkan pembinaan ke dalam dan belum menjangkau daerah luar seperti Palembang. Menurut P De Roo De Faille wilayah Palembang tidak mengalami kekosongan:

“Tersebut perkataan radja Palembang Dipati Karang Widura tatkala ia merintah, banjak tangga roemah dari Lebar Daoen kataboen toeloeng sangoep boeboengan. Ia Dipati Karang Widura membuat soeka seratoes iaitoe seratoes doesoen di oeloen mentjar, iaitoe Lematang, Moesi, Ogan, Komering, zaman itoelah ada pangeran-parawatin oeloean (Faille:1971:17).”

Hal senada juga dikemukakan oleh Van Sevenhoven masa kekosongan itu tidak ada, setelah Ario Dillah wafat, Palembang dipimpin oleh Karang Widura (Rahim,1986:44). Setelah dianalisa timbulnya perbedaan pendapat ini dianggap suatu yang wajar, sebab pengganti Ario Dillah tidak ditetapkan secara formal oleh pusat Kerajaan Demak.

Kesultanan Demak mengalami masa-masa sulit ketika Raden Fatah wafat. Konflik elit bangsawan dalam perebutan tahta terus terjadi, hingga Kerajaan Demak jatuh ke tangan Kerajaan Pajang. Dalam kemelut yang terjadi atas penyerangan Demak oleh Pajang ini, berpindahlah 24 orang keturunan Pangeran Trenggono (atau Keturunan Raden Fatah) dari Kerajaan Demak ke Palembang, dipimpin oleh Ki Gede Sedo Ing Lautan dan anaknya Ki Gede Ing Suro Tuo yang datang melalui Surabaya ke Palembang dan membuat kekuatan baru dengan mendirikan Kerajaan Palembang. Keraton pertamanya di Kuto Gawang. Namun Kerajaan Pajang tidak berusia lama. Dari Pajang kelak lahir Kerajaan Islam Mataram, dan Kerajaan Palembang menjadi wilayah *protektorat* (daerah pelindung) dari Kerajaan Mataram. (Amin,1986: 74).

Ki Gede Ing Suro Tuo memerintah sekitar tahun 1535-1572 sebagai raja pertama Kerajaan Palembang dan kemudian digantikan oleh saudaranya Ki Gede Ing Suro Ilir memerintah tahun 1572-1589. Kemudian diganti oleh anaknya Pangeran Kemas Depati 1589-1594. Setelah Pangeran Kemas Depati wafat Kerajaan Palembang digantikan oleh saudaranya Pangeran Madi Angsoka 1594-1627. Di masa Pangeran Madi Angsoka terjadi perang “kafir” dengan Bantam dan pada masa ini ditandatangani kontrak dagang dengan Belanda untuk pertama kali. Setelah Pangeran Madi Angsoka wafat terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Jambi dan Pangeran Madi Alit yang kemudian dimenangkan oleh Pangeran Madi Alit dengan gelar Raja Depati (1627-1629). Pemerintahan Pangeran Madi Alit tidak berlangsung lama. Kemudian pemerintahannya digantikan oleh saudaranya Pangeran Side Ing Puro atau Pangeran Made Soka atau lebih dikenal Raden Aria (1629-1636). Setelah Raden Aria wafat kekuasaan Kerajaan Palembang digantikan oleh Pangeran Side Ing Kenayan (1636-1652). Pada masanya dibentuklah peraturan untuk melindungi rakyatnya yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya. Setelah Pangeran Side Ing Kenayan wafat pemerintahan digantikan oleh Pangeran Side Ing Pesariyan (1652-1653). Raja terakhir

dari Kerajaan Palembang adalah Pangeran Side Ing Rajek (1653-1659) (Rahim,1986:44-45).

Mengamati nama-nama yang digunakan oleh raja-raja Kerajaan Palembang tampak jelas masih adanya hubungan Kerajaan Palembang dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Hubungan ini telah berlangsung selama berabad-abad sejak abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-17 M sejak Majapahit, Demak-Pajang sampai dengan Mataram. Dalam hubungan ini tidak luput dari peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban untuk datang menghadap raja (*seba*) sebagai bukti loyalitas, menghantarkan upeti kepada raja dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam peperangan (Amin,1986:77-78).

Semula hubungan ini berlangsung secara baik dan teratur, namun dalam perkembangannya membawa perubahan, khususnya semasa Kerajaan Mataram. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid IV yang dikutip oleh Amin (1986: 81) disebutkan dalam sejarah Kerajaan Mataram nampak sekali hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan baik. Pengalaman dari penguasa Kerajaan Palembang selalu mengalami penolakan dari Kerajaan Mataram. Ketika Pangeran Sido Ing Rajek berkuasa dan mengirim utusan ke Mataram, ditolak oleh Amangkurat I. Hal serupa terjadi pada penguasa-penguasa sebelumnya.

Tahun 1659, kekuasaan Kerajaan Palembang diserahkan dari Pangeran Sido Ing Rajek kepada Pangeran Ratu Ki Mas Hindi yang memerintah tahun 1659-1706. Pada masanya agama Islam tersebar dengan luas dan Kerajaan Palembang berhasil melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Mataram-Jawa serta merubah nama Kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Ratu Ki Mas Hindi memperoleh gelar Sri Susuhunan Abdurahman Cinde Walang (Utomo dkk, 2005:176).

Kesultanan Palembang Darussalam harus mengalami derita pahit di awal peresmiannya. Tahun 1659, Keraton Kuto Gawang yang menjadi pusat kesultanan dibakar oleh Belanda. Pemicu konflik disebabkan dibantainya orang-orang Belanda di

kapal yang berlabuh di Sungai Musi oleh Pangeran Side Ing Rajek. Sehingga pusat Kesultanan Palembang Darussalam dipindahkan ke Keraton Beringin Janggut (Utomo dkk, 2005:176).

Di sinilah fondasi awal peletakan kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam. Fondasi dasar Kesultanan Palembang Darussalam terus dibangun hingga Sultan Mahmud Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714), dan Sultan Agung Komaruddin Sri Truno (1714-1724). Pada masa ini, oleh beberapa penulis Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam merupakan masa pertengahan (Hanafiah,1989:27).

Bangkitnya pembangunan secara nyata dan membawa kepada kemakmuran rakyat terjadi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau lebih dikenal SMB I. Ia berkuasa pada tahun 1724-1758, pada masanya dibangun Masjid Agung, Makam Lemabang, dan Kuto Tengkuruk. Ia Juga membangun Keraton Kuto Besak, sehingga ia lebih dikenal dengan “Bapak Pembangunan”. Keberhasilannya kemudian dilanjutkan oleh Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo (1758-1776) (Mahmud, 2004:47).

Pemerintahan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo, tidak mengalami perubahan yang besar. Ia hanya melanjutkan keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo hingga akhir hayatnya. Setelah Ia wafat, kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin, terjadi perubahan ekonomi dan budaya, sehingga kemakmuran rakyat dapat dirasakan. Di bidang budaya, Palembang menjadi pusat kebudayaan dan pusat syi'ar agama Islam di kawasan belahan Barat Nusantara. Melalui sastra Melayu menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama Islam di seluruh Nusantara (Utomo dkk,2005:191). Hingga akhir hayatnya, rakyat Palembang merasakan masa-masa keemasan. Rakyat mengalami kemakmuran, keamanan terjaga, ilmu pengetahuan Islam menjadi berkembang. Wafatnya Sultan

Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Raden Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821). Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan sultan terakhir Kesultanan Palembang Darussalam (Safwan,2004: 26).

Situasi dan Kondisi Kesultanan Palembang Darussalam Sebelum Tahun 1803

Palembang mendapat banyak julukan atas keberhasilan pembangunan politik, ekonomi, dan sosialnya. Bagaikan pusat perdagangan di Eropa yaitu Venesia, maka Palembang mendapat julukkan *net indische Venetie*. Bahkan nama *darussalam* diterjemahkan *de stad des vredes* yang berarti tempat yang tentram. Gambaran ini dikemukakan oleh Mayor M.H Court yang dikutip oleh Djohan Hanafiah (1996: 48-49) :

“Dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu, Palembang telah membuktikan dan terus secara seksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan dengan peraturan yang paling baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa. Begitu memasuki perairan sungai, perahu-perahu kecil dengan kewaspadaan yang biasa dan tindakan-tindakan pencegahan yang akan mengamankan dari kekerasan dan perampasan. Di bagian luar sungai perahu-perahu kecil perampok setiap saat bersembunyi di dalam *suak* (anak-anak sungai kecil) dan terlindung di bawah hutan sepanjang pantai akan memangsa perahu-perahu dagang kecil yang memasuki sungai, tetapi hal ini jarang terjadi karena dijaga oleh kekuatan sultan dengan segala peralatan.”

Kondisi Ekonomi

Pernyataan Mayor M.H Court di atas tidak berlebihan kalau situasi politik dan pelayanan di bidang perdagangan Palembang sudah sedemikian baik, sehingga mempunyai citra tersendiri. Tidak perlu diragukan pula bahwa prasarana dan sarana dalam perdagangan lokal dan internasional di Palembang tersebut. secara internasional (Nusantara) berlaku ”Undang-Undang Laut Malaka” suatu hukum Melayu, dimana ada pengadilan untuk pedagang-pedagang asing yang diadakan bagi bangsa-bangsa mereka

dilaksanakan oleh syahbandar dengan dibantu oleh beberapa nahkoda (Hanafiah,1996:50).

Di samping itu, komoditi yang diperlukan oleh dunia perdagangan internasional adalah lada dan timah. Kedua komoditi tersebut merupakan primadona bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Meskipun kesultanan telah terikat monopoli perdagangan dengan VOC (*Verrenigde Oost Indische Compagnie*), akan tetapi permintaan pasar sangat meningkat. Meningkatnya pasaran lada, diakibatkan oleh permintaan pasar yang tinggi, bukan hanya pasar Eropa, permintaan juga meningkat di pasar Cina (Hanafiah,1996:51). Meningkatnya permintaan menimbulkan adanya "pasar bebas". Pihak Kesultanan Palembang dengan bebasnya menjual produksi lada ke kerajaan-kerajaan lain dan termasuk kepada kolonial Inggris tanpa adanya intervensi dari serikat dagang Belanda atau VOC.

Akibat adanya pasar bebas tersebut penjualan produksi lada ke Belanda mengalami penurunan. Menurut William Marsden, lada yang dijual ke VOC pada tahun 1780-an berjumlah sekitar 1/3 dari produksi Palembang. Jumlah ini terus merosot dengan cepat pada tahun-tahun sesudahnya. Tahun 1784 tercatat lada yang dijual ke VOC sebesar 3.093 pikul. Jumlah ini ternyata tak mengalami peningkatan pada tahun-tahun sesudahnya. VOC terus menuntut hak monopolinya kepada sultan Palembang dan mendesak untuk memperbarui kontrak. Hingga kontrak terakhir pada masa kepemimpinan Sultan Bahauddin tahun 1791. Kontrak ini, VOC hanya mendapatkan 2.000 pikul. Sementara itu, menurut catatan residen Palembang, penjualan lada ke Makau (Cina) ditaksir mencapai 20.000 pikul setahunnya. Keadaan ini memberikan bukti betapa merosotnya jumlah lada yang diterima VOC (Hanfiah,1996:52).

Kasus merosotnya jumlah komoditi lada yang diterima Belanda, merupakan awal timbulnya benih-benih konflik antara Kesultanan Palembang dengan kolonial Belanda. Oleh karena itu, dengan pendekatan sosiologi untuk mencegah konflik yang

berkepanjangan dan memelihara sistem secara keseluruhan. Dalam teori struktur fungsional menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan jaringan dari bagian-bagian yang saling terkait, setiap bagian menyumbang pada pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Masyarakat pada dasarnya akan selalu bergerak ke arah interaksi yang mempersatukan (*integrative*). Integrasi merupakan bentuk dasar interaksi masyarakat (Dahrendorf,1986:199). Ketegangan dan konflik akan terus terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, ketegangan dan konflik tersebut akan lenyap. Masyarakat akan kembali berada dalam keseimbangan. Hal ini terjadi karena dalam setiap sistem sosial terdapat konsensus atau kesepakatan di antara warga masyarakat mengenai nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi sistem sosial. Dalam kasus merosotnya perdagangan lada dengan kolonial Belanda yang menimbulkan ketegangan, Maka ketegangan yang timbul diatasi dengan dibuatnya perjanjian kontrak di antara kolonial Belanda dengan Kesultanan Palembang Darussalam.

Keberhasilan Kesultanan Palembang Darussalam dalam mencegah timbulnya ketegangan dan terbentuknya konsesus dengan kolonial Belanda, meningkatkan kembali perdagangan di Palembang. Pada priode Oktober 1790 sampai 1792, kapal-kapal dari dan ke Palembang berjumlah 374 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari pedagang pribumi, Cina, Arab dan Belanda. Lalu lintas perdagangan Palembang dan Bangka menjadi ramai. Selain melalui jalur laut, perdagangan juga dilakukan melalui jalur darat. Pedagang pribumi maupun Cina membawa produksi lada melalui jalan darat menuju ke Krui dan Bengkulu. Kemudian menjualnya kepada orang-orang Inggris di sana (Hanfiah,1996:53). Keikutsertaan Inggris dalam perdagangan lada secara ekonomi memberikan keuntungan yang besar kepada Kesultanan Palembang Darussalam. Namun selanjutnya hubungan ekonomi dengan Inggris menjadi "*bomerang*" yang mengancam stabilitas kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam.

Selain lada, komoditi ekspor sebagai pemasok keuangan Kesultanan Palembang adalah timah. Pulau Bangka merupakan pusat industri timah paling awal. Tahun 1722, VOC membeli timah untuk dijual ke Eropa dan membujuk sultan agar timah menjadi perdagangan monopoli dan kesepakatan dibentuk dengan perjanjian kontrak. Penjualan kepada VOC tahun 1730-1740 rata-rata 20.000 pikul pertahun (1 pikul = 62,5 kg). Selain dijual ke VOC penjualan terbesar timah adalah negeri Cina. Produksi keseluruhan timah Bangka sebenarnya $\pm$ 50.000-60.000 pikul pertahun. Tahun 1783 sebanyak 30.000 pikul, dijual ke Kesultanan Riau (Hanfiah,1996:54).

Perdagangan monopoli yang dilakukan oleh VOC menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya akan menciptakan penguasaan pasar. Dasar inilah yang menjadi latar dari teori persaingan tak sempurna, menurut teori ini monopoli murni (*pure monopoly*) terjadi dimana satu perusahaan tak menghadapi pesaing (Sukirno,2009:266). Berbeda di pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan tak bisa mempengaruhi harga (*price-taker*). Artinya penjual barang yakin bahwa mereka dapat menjual sebanyak mungkin yang mereka hendaki pada harga yang berlaku, dan tak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima atas produk yang mereka jual (Krugmen dan Obstfeld,2002:150-151).

Namun monopoli yang terjadi di masa Kesultanan Palembang Darussalam yang coba diterapkan oleh VOC tampaknya bukanlah monopoli murni. Jika dianalisis kembali ternyata VOC dalam melakukan perdagangan internasionalnya di Kesultanan Palembang Darussalam mendapat persaingan. Ini artinya walaupun VOC telah melakukan kontrak monopoli perdagangan lada dan timah namun jumlah yang perdagangan yang diperoleh lebih kecil bahkan mendapat persaingan dagang dari Cina

dan Kesultanan Riau. Dengan demikian, monopoli yang dilakukan oleh VOC merupakan monopoli tidak murni (Teguh,2010:67).

Bilas yang dikutip oleh Muhammad teguh (2010:67) dalam bukunya Ekonomi Industri memberikan pengertian monopoli murni (*pure monopoly*):

“A pure monopoly is represented by a market situation which there is a single seller of a product for which there are no substitutes; this single seller is unaffected by, and does not affect, the prices and output of other products sold in economy. This market, again, highly idealized, for it is hard to believe that in a highly independent economy system, someone could possibly sell a product for which there are no substitutes.”

Jika dilihat dari pengertian di atas, pada struktur ekonomi pasar monopoli murni, dimana perusahaan tak menghadapi pesaing (Krugmen dan Obstfeld,2002: 151). Maka pelaku pasar monopoli murni pada perdagangan internasional awal kesultanan dan priode akhir kesultanan adalah Kesultanan Palembang Darussalam itu sendiri.

Monopoli hadir di dalam pasar guna memperoleh keuntungan pasar yang sebesar-besarnya atas produks yang dijualnya. Keuntungan merupakan pendapatan bagi kesultanan. Oleh karena itu, kesultanan sebagai produsen selalu berusaha maksimal menggunakan berbagai strategi bisnis yang dimilikinya guna memperbesar keuntungan pasar yang diraihnya, baik untuk meningkatkan jumlah kekayaan pribadi yang dimiliki maupun guna memeperluas usaha bisnis yang dikelolahnya (Teguh,2010:72). Thomas Raffles memberikan gambaran terhadap kekayaan Kesultanan Palembang Darussalam:

” Sultan Palembang adalah seorang pangeran Melayu yang terkaya dan benar apa yang dikatakan bahwa gudangnya penuh dolar dan emas yang ditimbun oleh para leluhurnya. Saya anggap inilah yang merupakan pokok penting untuk menghalangi Daendles memanfaatkan pengadaan sumber yang besar tersebut (Hanafiah,1996:56).”

Keberadaan monopoli di dalam pasar diakui dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas, kalau monopoli tersebut hanya mengutamakan keuntungan ekonomi semata. Akan tetapi, jika kehadirannya disertai dengan output yang berkualitas dan harga jual yang murah, maka kehadiran perdagangan monopoli tidak mendatangkan

bahaya bagi masyarakat (Teguh,2010:72). Walaupun perdagangan internasional Kesultanan Palembang Darussalam yang berbentuk monopoli. Namun, Selain menambah pemasok kekayaan, Kesultanan Palembang Darussalam mampu membangun peradaban modern kala itu seperti Masjid Agung, Benteng Kuto Besak, makam sultan-sultan Palembang dan lainnya sebagai upaya untuk memakmurkan rakyatnya (Hanafiah,1995:65).

Keuntungan dan kekayaan yang diperoleh Kesultanan Palembang Darussalam dalam perdagangan lada dan timah pada akhirnya menarik perhatian kolonial Belanda dan Inggris untuk ikut serta dalam perdagangan internasional tersebut. Maka hal ini pada gilirannya mengundang para kolonial sebagai calon pesaing untuk memasuki pasar. Kesultanan menyadari betul adanya situasi ancaman kolonial sebagai pesaing potensial untuk memasuki pasar bila kehadirannya di dalam pasar selalu mendapatkan keuntungan super normal (Teguh,2010:75). Untuk itu, kesultanan melakukan strategi pasar lainnya agar terhindar dari ancaman persaingan pasar. Salah satu strategi pasar kesultanan untuk menghindari persaingan pasar dengan kolonial Belanda dan Inggris dengan melakukan "perdagangan bebas" dengan penguasa Cina dan Kesultanan Riau (Hanafiah,1994:65).

Terbentuknya perdagangan bebas, menimbulkan kesenjangan antara VOC dan Kesultanan Palembang Darussalam. Penjualan timah dan lada yang diterima VOC lebih sedikit dari Cina dan Kesultanan Riau. Upaya memperoleh monopoli murni (*pure monopoly*) atas kedua komoditi tersebut, VOC terus menekan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian dibuatlah perjanjian dagang antara kolonial Belanda dengan Kesultanan Palembang Darussalam, perjanjian tersebut selalu diperbarui setiap pergantian tahta (Amin,1986:102).

Dengan adanya perjanjian dagang tersebut perekonomian Kesultanan Palembang terus tertekan. Perjanjian dagang yang paling menekan pihak kesultanan terjadi pada

masa pemerintahan Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo tanggal 15 Juni 1763. Isi perjanjian dagang tersebut:

1. Monopoli lada yang bersih dengan harga enam real diterima di gudang kompeni di Betawi.
2. Jaminan keselamatan tanaman lada di daerah Kesultanan Palembang.
3. Pengadaan dalam tahun pertama 2000 pikul berat 125 pond *Olanda*, tahun kedua dan ketiga 300 pikul, tahun keempat, kelima, keenam dan seterusnya 4000 pikul.
4. Bangsa kulit putih lainnya dilarang singgah atau berniaga di Pulau Bangka.
5. Memeberantas penyelundupan lada, timah, opium, dan kain-kain. Syahbandar harus membantu kompeni.
6. Kompeni member izin kepada rakyat untuk berlayar, dengan ketentuan tidak boleh singgah di Banten, di pihak masyrik Betawi sampai sepanjang Lor tanah Jawa. Di pihak magrib sampai ke pihak Malaka akan diperkirakan oleh Gubernur Jenderal atas permintaan Sultan. Sultan boleh memberi izin ke Negeri Siam.
7. Pelayaran dari dan ke negeri Cina dilarang.
8. Orang-orang kompeni yang mencuri lada harus dilaporkan oleh Sultan kepada Gubernur Jenderal.
9. Menjamin keamanan Laut Bangka dan Laut Belitung (Amin,1986:102).

Pada akhirnya, sekalipun perjanjian antara kesultanan dengan kolonial sudah berlangsung lama, hal itu dilakukan sebelum terjadi pengakuan secara formal dan biasanya sultan tidak kehilangan kedaulatannya. Menjelang akhir abad ke-19, penguasa kolonial Belanda mencoba menyingkirkan peran sultan dalam bidang ekonomi, baik melalui perjanjian damai maupun melalui ancaman militer (Ardhana,2005:64).

Kondisi Politik

Politik dalam negeri, yang dijalankan kesultanan selama berdiri kurang lebih 50 tahun membuktikan telah berhasil menciptakan organisasi pemerintahan yang cukup stabil, dimana ketentraman dan keamanan bagi penduduk dan perdagangan yang cukup memadai terpelihara dengan baik (Amin,1986:100). Sistem pemerintahan yang dibangun merupakan sistem pemerintahan kesultanan.

Bentuk pemerintahan yang diterapkan pada Kesultanan Palembang Darussalam merupakan bentuk monarki atau kerajaan. Dimana penguasa atau raja diganti

berdasarkan garis keturunan atau keluarga. Berbeda dengan bentuk monarki yang diterapkan pada masa sebelumnya, bentuk pemerintahan pada Kesultanan Palembang Darussalam berlandaskan pada fondasi agama Islam sehingga beberapa aturan yang diterapkan harus berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah seorang sultan. Dalam menentukan keputusan-keputusan selalu didasarkan atas al-Qur'an, Hadist, undang-undang dan piagam-piagam (PemProv,1986:24).

Nama kesultanan merupakan sebuah pengakuan suatu wilayah yang hukum dan peraturan pemerintahan berdasarkan pada syariat Islam. Penggunaan nama sultan sendiri bermula pada masa pemerintahan Dinasti Turki Usmani. Sejalan dengan itu, Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa:

” Negara harus diadakan untuk terlaksanakannya syari'at. Artinya negara dalam konsep Islam pertama-tama adalah *nomokrasi* (negara berdasarkan hukum Islam). Namun demikian untuk mendirikan negara dan menjalankan fungsi-fungsi negara itu sendiri selain harus didasarkan kepada standar yang ditentukan oleh hukum (syari'at), harus pula didasarkan pada musyawarah antar sesama warga masyarakat (Hatamar,2007:171).”

Dengan kata lain, bentuk pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang diterapkan merupakan bentuk monarki dan peraturan pemerintahan dijalankan berdasarkan *nomokrasi*.

Paradigma hubungan antara kekuasaan (negara) dan agama pada Kesultanan Palembang Darussalam berhubungan secara *mutualistik* yaitu hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan kekuasaan. Sebab melalui kekuasaan, agama dapat berkembang dengan baik. Hukum-hukum agama dapat ditegakkan melalui kekuasaan. Begitu juga sebaliknya, kekuasaan memerlukan kehadiran agama , karena dengan agama suatu kekuasaan dapat berjalan dengan sinaran etika-moral (Syawaluddin,2008:3).

Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah bayang-bayang Tuhan dan wakil-Nya di muka bumi” (*zillullah fil al-ardh*). Kalau ditelusuri lebih lanjut, konsep yang

menyatakan "Raja merupakan bayangan Tuhan di muka bumi", tampaknya dianut oleh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Al-Ghazali mengibaratkan hubungan agama dengan sultan sebagai dua anak kembar. Agama sebagai fondasi, dan sultan sebagai penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan fondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi tertib agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti (Shadzali,1990:76).

Selanjutnya Al-Ghazali mengemukakan bahwa:

"Allah telah memilih dari cucu-cucu Adam dua kelompok pilihan yaitu: pertama, para nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang benar dan membawa kebahagiaan dunia dan akherat, dan kedua para sultan yang menjaga hamba-hamba-Nya tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak yang lain. Untuk itu setiap hamba wajib mengikuti perintah sultan, serta tidak dibenarkan untuk menentangnya dan tidak mengikuti perintahnya (Shadzali,1990:77)."

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Tamiyah hubungan agama dan negara merupakan jalinan yang tidak dapat dipisahkan, kalau agama dan negara dipisahkan maka akan hancur umat manusia (Shadzali,1990:78). Jika dikaji kembali, tampaknya konsep *zillullah fil al-ardh* tak berlaku di Kesultanan Palembang Darussalam. Wacana ini merupakan upaya legitimasi sultan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi dilematis, menentang kezaliman sebagai bagian *nahi munkar*. Di sisi lain menentang sultan sama dengan menentang Allah, ini artinya rakyat menjadi kafir, orang kafir wajib dimusuhi dan dibunuh.

Belum terdidiknya lingkungan kesultanan yang beragama Islam untuk memahami konsepsi kenegaraan menurut Islam, sehingga pada tataran konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an dan Hadist serta teori *zillullah fil al-ardh* yang ditafsirkan oleh para ulama kesultanan pada waktu itu tidak dapat diserap secara maksimal. Malah yang muncul ke permukaan adalah konsepsi kenegaraan Hindu-Jawa (Kartodirjo,1988:48-49).

Dalam konteks Islam, sebagaimana dikatakan oleh M. Arkoun (1996:62) peradaban Islam tidak lain adalah peradaban “*teks*”. al-Qur’an dan sunnah menduduki peran fundamental yang sangat mempengaruhi perwatakan dan pembentukan tradisi Islam dalam lintasan sejarahnya. Perkembangan sosial kultural masyarakat Islam tidak dapat dilepaskan dari tuntutan dan penafsiran atas teks al-Qur’an. Dalam arti itulah bisa dikatakan bahwa dalam peradaban Islam, agama tidak hanya menjadi faktor komplementer, tapi menjadi *elemen vital* dari terbentuknya sistem sosial-politik masyarakat Muslim. Teks agama tersebut pada akhirnya memiliki muatan doktrin dan aksi sosial-politik.

Bahkan John L. Esposito (1990:41) dalam bukunya *Islam dan Politik* menyatakan bahwa faktor signifikan dan elemen terpenting dalam politik Islam adalah teks yang telah terkodifikasikan dalam syari’at. Syari’at merupakan elemen kunci yang menyambungkan hubungan Islam dan politik. Syari’at juga menjadi pembeda dari doktrin dan aksi politik Islam dengan non-Muslim. Pada akhirnya syari’at ini menjadi pembentuk identitas kemusliman seseorang dan menjadi dasar bagi pendirian suatu negara.

Terlepas dari hubungan agama dan negara, hubungan Kesultanan Palembang Darussalam dengan negara-negara tetangga umumnya terpelihara dengan baik. Untuk memperkuat hubungan ini selain melalui ikatan dagang juga diikat dengan ikatan kekeluargaan dengan sistem perkawinan. Sultan Susuhunan Ario Kesuma Abdurahim Khalifatul Mukmin Syaidul Imam menikahkan putranya Raden Ario yang bergelar Senopati Jayo Ing Lago dengan Putri dari Jambi. Sedangkan saudari perempuan Sultan Susuhunan dinikahkan dengan Ario Pulang Jiwa dari Pakuon Banten. Sedangkan Sultan Susuhunan telah menikahi seorang putri dari Banten (Amin,1986:101).

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam diatur rapi, begitu juga pada aparaturnya. Diadakan peraturan-peraturan bagi para pedagang dan penduduk

datangan. Juga diberlakukan hukum-hukum adat, yang bersumber pada kitab Undang-Undang "Simbur Cahaya", kemudian ditambah lagi undang-undang wilayah, yaitu "Sindang Mardike". Di bidang peradilan, dikenal dua macam peradilan, pertama yang mengadili perkara-perkara keagamaan yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nato Agama, yang membawahi pangeran-pangeran penghulu. Kedua yang mengadili perkara-perkara yang diancam hukuman badan, pimpinan Tumenggung Karto Negara. Di bidang pelabuhan yang berkuasa adalah syahbandar, setiap kapal yang masuk dikenakan bea pelabuhan yang besarnya menurut banyaknya anak kapal (PemProv, 1986:23-24). Dengan diaturnya sistem pemerintahan pada Kesultanan Palembang Darussalam maka terjaminlah ketertiban masyarakat, sehingga terciptalah keamanan dan ketentraman serta berkembang berbagai kegiatan seperti pertanian, perdagangan, kesenian dan kesusastraan.

Prestasi politik Kesultanan Palembang Darussalam yang paling menentukan perkembangan kesultanan terjadi pada masa Sultan Susuhunan dengan kebijakannya untuk melepaskan diri dari ikatan *protektorat* Kesultanan Mataram tahun 1675 tanpa menimbulkan perang penindasan (Amin,1986:101). Prestasi politik lainnya adalah ketika pergantian kekuasaan dari Sultan Ratu Ahmad Najamuddin I ke Sultan Muhammad Bahauddin hingga Sultan Mahmud Badaruddin II, di dalam lingkungan keraton relatif tidak terjadi gejolak politik. Hukum di dalam pemerintahan benar-benar diberlakukan dengan baik dan tegas (Utomo dkk,2005:188). Peristiwa sejarah ini kemudian membantah konsep pergantian elit yang dikembangkan Pareto yang mengemukakan bahwa pergantian elit sering menimbulkan perebutan kekuasaan dilakukan oleh kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri (Varma,1987:205-203).

Politik Kesultanan Palembang Darussalam mendapat tantangan berat dalam menghadapi imperialisme dan kolonialis Eropa (Belanda dan Inggris). Dengan

kelebihan teknologi dan kelicikan politiknya banyak mendatangkan kerugian kepada Kesultanan Palembang. Politik Belanda *minta tanah* sambil menggunakan taktik tipu muslihat *divide et impera*, dimulai dengan menjalin hubungan persahabatan guna mendapatkan izin perdagangan di kerajaan yang bersangkutan, kemudian mengusahakan dengan segala jalan untuk menekan harga jual-beli demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Kemudian meningkatkan monopoli yang dipaksakan dan mulai mencampuri urusan dalam negeri kesultanan untuk kemudian dikuasai (Amin,1986:101-102). Dengan taktik tipu muslihat tersebut pada akhirnya menjadi faktor lahirnya konflik bagi Kesultanan Palembang Darussalam baik secara internal maupun eksternal.

Kondisi Sosial

Kehidupan sosial di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam memiliki stratifikasi sosial. Penduduk pada masa itu dikelompokkan menjadi dua golongan besar yaitu golongan priyayi dan golongan rakyat. Priyayi berarti keturunan raja-raja atau kaum ningrat. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran atau atas perkenaan dari raja. Istilah Priyayi atau darah biru dalam kebudayaan Jawa yang juga diterapkan di Kesultanan Palembang Darussalam merupakan istilah untuk menerangkan suatu kelas sosial yang kepada golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Golongan priyayi tertinggi disebut Priayi Ageng (bangsawan tinggi). Gelar dalam golongan ini terbagi menjadi bermacam-macam berdasarkan tinggi rendahnya suatu kehormatan. Priyayi dibagi menjadi tiga golongan: Pangeran, Raden dan Masagus (Aly,1986:156).

Golongan yang kedua adalah rakyat, mereka terbagi dalam tiga golongan yaitu: Kyai Mas, Kyai Agus dan rakyat jelata. Kyai Mas adalah anak laki-laki dari perkawinan seorang mas ayu dengan pria dari rakyat jelata. Kyai Agus adalah anak laki-laki dari

mantri dan turunan raden yang terendah dengan rakyat jelata. Mereka diwajibkan ikut serta dalam pekerjaan yang ringan dan halus, tetapi tidak untuk mendayung atau mengerjakan pekerjaan kasar (Aly,1986:157).

Golongan rakyat yang kebanyakan dibagi lagi atas orang Miji, orang Senan dan orang yang mengadaikan diri dan budak. Orang Miji mempunyai beberapa orang yang dapat dipergunakan dalam berperang, ada juga yang dapat melakukan pekerjaan tangan atau membuat karya-karya seni dan mereka dipergunakan oleh sultan, para pangeran atau raden. Orang Senan adalah golongan terendah setelah Miji, tapi tidak boleh dipekerjakan oleh siapapun kecuali sultan. Orang Senan dipekerjakan sultan untuk memperbaiki perahu dan rumah sultan, juga untuk mendayung perahu. Orang yang mengadaikan diri dan budak adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan sultan. Tenaga mereka dipakai oleh orang yang meminjamkan uang atau oleh orang yang membeli untuk memerdekakan mereka (Rahim,1998:63).

Kehidupan sosial kesultanan yang terstratifikasi, tampaknya berbanding terbalik dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, tidak ditemukan adanya stratifikasi sosial. Islam sendiri tidak memandang kedudukan seseorang dari sisi fisik, jabatan atau status sosial maupun harta melainkan dipandang dengan ketaqwaannya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13 “...*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...*”. Dalam catatan sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang ditulis oleh Philip K. Hitti seorang orientalis dalam bukunya *History of the Arab* (2002:150) menerangkan bahwa:

“ Kehidupan Nabi Muhammad pada priode Madinah dicirikan dengan turunnya surah-surah al-Qur'an yang panjang dan luas cakupannya. Selain hukum-hukum agama seputar puasa, zakat dan shalat, juga meliputi ketentuan sosial-politik tentang pernikahan, penceraian, perlakuan terhadap budak, tahanan perang dan musuh.”

Dari uraian di atas baik dalam ajaran Islam dan perilaku Nabi Muhammad tidak ada yang mencerminkan kehidupan yang berstratifikasi dan perbudakkan.

Situasi yang bertolak belakang dapat dilihat dalam kehidupan keagamaan di Palembang yang memperlihatkan kemajuan kualitatif para sultan merupakan orang yang taat beragama, mereka sering menjadi imam di masjid. Ulama-ulama mendapat tempat tersendiri dalam kehidupan sultan. Para sultan sangat dekat dengan ulama untuk mendiskusikan soal-soal keagamaan (Wolders, 1976:132). Terhadap pelanggaran ajaran agama yang prinsipil, para sultan bersikap tegas. Tahun 1819, sultan pernah menyuruh membunuh dan merajam wanita-wanita jalang yang terang-terangan mengadakan hubungan dengan serdadu Belanda (Sevenhoven, 1971:42).

Pembinaan dan pengembangan Islam di pedalaman tak luput dari perhatiannya. Kesultanan telah mengirim penghulu dan khatib-khatib hampir di seluruh pelosok wilayah. Di daerah Musi Banyuasin dikirim khatib Ahmad, bersama Kyai Haji Abdurahman Delamat (Aly, 1986:160). Menjadi sebuah problem tersendiri dimana kesultanan yang menjadikan Islam sebagai “agama resmi”, tetapi dalam kenyataannya kehidupan sosial masyarakat masih terstratifikasi.

Situasi terbalik antara kehidupan sosial dengan ajaran Islam dan kondisi bertolak belakang antara kehidupan sosial masyarakat dengan kehidupan para sultan dan kebijakannya. Kondisi ini menjadi tanda tanya besar mengapa masih ada stratifikasi sosial dan perbudakkan di tengah kepemimpinan Islam yang berjuduk Kesultanan Palembang Darussalam?

Husni Rahim (1998:54) memiliki pandangan berbeda mengenai kesenjangan antara ajaran Islam dengan kehidupan sosial masyarakat Palembang, menurutnya :

“ Potret suasana keagamaan di Palembang tersebut menarik, di satu sisi agama Islam telah menjadi “agama resmi” kesultanan yang dilambangkan oleh gelar “sultan” dan adanya lembaga keagamaan penghulu sebagai birokrat agama dari pusat kesultanan sampai tingkat marga. Di sisi lain masih tampak pengalaman agama Islam orang Palembang masih “kurang mendalam”. Hal ini hendaknya

tidak dipandang sebagai suatu kontradiksi, tapi memberi petunjuk bahwa antara “konsep ajaran” dengan “pengalaman ajaran” masih ada jarak (gap). Oleh karena itu tidak heran bila pejabat Belanda di Palembang merasa ragu atas tingkah laku mereka yang dianggap berbeda dengan kebiasaan orang Islam.”

Tampaknya sejarah stratifikasi sosial di Kesultanan Palembang terbentuk dan dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit di Jawa. Dalam laporan Van Sevenhoven mengatakan bahwa Kesultanan Palembang menganut pola *pancalang lima* dari Majapahit yang menjelaskan bahwa “untuk pemerintahan suatu kerajaan diperlukan seorang *susuhunan*, seorang *adipati*, seorang *papatih*, seorang guru dan seorang jaksa (Rahim,1998:18).

Pernyataan di atas, senada dengan yang dikemukakan oleh Soedjito Sosrodiharjo tentang perubahan struktur masyarakat di Jawa yang dikutip oleh Susanto (1979:101) menyatakan bahwa:

“Dapat diketahui bagaimana sebelumnya disekitar abad 13-14, pada lapisan teratas adalah raja, diikuti oleh pegawai negara dan pujangga. Kemudian baru pada zaman kemunduran Majapahit, bupati-bupati khususnya di sepanjang pantai Jawa makin lama makin peran penting bersaing dengan kekuasaan keraton. Akhirnya dengan makin berpengaruhnya VOC di Nusantara maka rantai lapisan semakin bertambah, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin makin jauh, hal ini tampak dalam hubungan antara *kawula* dan *gusti*.”

Ikatan antara atasan dengan priyayi bawahan, seperti halnya antara priyayi dengan rakyat, dikatakan sebagai kelanjutan dari hubungan *kawula-gusti* menurut tradisi klasik Jawa atau juga sering disebut dengan hubungan “tuan” dan “hamba” atau “*patron*” dan “*client*”. Ini merupakan ikatan antara perintah dan kepatuhan tanpa syarat, tetapi juga merupakan ikatan yang sangat pribadi, yaitu saling ketergantungan yang rapat antara dua manusia. Ikatan ini didasarkan atas model hubungan kekeluargaan antara sesama saudara atau ayah dan anak yang dijalin dengan gagasan-gagasan kesatriaian, hubungan guru-murid dalam agama, serta persatuan dalam dunia mistik. Sekalipun demikian, batasan antara atasan dan bawahan ditandai dengan tegas sekali

oleh tata cara kepangkatan dan bentuk-bentuk penghormatan yang rumit dan tak dapat dihindari (Rahim,1998:196-197).

Jauh sebelum stratifikasi sosial Kerajaan Majapahit di Jawa terbentuk, sejarah stratifikasi sosial telah berlangsung lama ketika kekaisaran Roma. Hal ini dijelaskan oleh Marx, Marx berpendapat tentang stratifikasi sosial dalam bentuk *Ascribed-Status* (status yang diperoleh sejak lahir). Baginya stratifikasi sosial adalah suatu fenomena yang telah ada sejak dulu kala. Dalam kekaisaran Roma terdapat pembagian tegas antara *patricians* (bangsawan) dan *plebeians* (orang kebanyakan). Dalam abad pertengahan masyarakat terbagi menjadi beberapa estates, estates ini merupakan suatu piramid dengan raja yang berada dipuncaknya (Mitchel,1984:156).

Seorang sosiolog, Pitirin A. Sorokin mengatakan bahwa sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak, suatu keadaan tidak semua orang bisa demikian bahkan hanya sedikit orang yang bisa, dianggap oleh masyarakat berkedudukan tinggi atau ditempatkan pada lapisan atas masyarakat dan mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut, dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah atau ditempatkan pada lapisan bawah masyarakat. Perbedaan kedudukan manusia dalam masyarakatnya secara langsung menunjuk pada perbedaan pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab nilai-nilai sosial dan perbedaan pengaruh di antara anggota-anggota masyarakat (Ahmadi,1997:197). Selain itu, Weber juga menegaskan dalam konsepnya bahwa, "Stratifikasi adalah gengsi. Dengan gengsi itulah dapat memberikan kenaikan kepada pembentukan kelompok status (dihormati) seperti orang-orang yang tergolong kebangsawanan, profesi ilmiah dan pegawai tinggi"(Poloma,2007:302).

Jika ditinjau dari sifatnya, maka stratifikasi di Kesultanan Palembang Darussalam merupakan stratifikasi sosial tertutup (*Closed Social stratifikation*). Stratifikasi sosial tertutup (*Closed Social stratifikation*) biasanya membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Di dalam Sistem lapisan yang seperti ini satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu lapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran. Sebagai contoh adalah pelapisan pada masyarakat yang berkasta, pada masyarakat feodal atau pada masyarakat yang menggunakan ras sebagai dasar pelapisan sosialnya (Ishomuddin,2005:230). Oleh karena itu, kedudukan orang Senan, Miji, budak dan orang yang mengadaikan diri dalam masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam tidak dapat merubah statusnya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, dalam kehidupannya masyarakat Palembang dikenal sebagai pekerja-pekerja tangan yang sangat teliti. Dalam hal pekerjaan tembaga dan besi mereka sangat baik, mereka mengecor meriam-meriam dari tembaga, senapan, keris, pedang dibuat dengan baik. Mereka juga ahli di bidang pekerjaan perak dan emas, terutama dalam membuat pahatan timbul. Wanita-wanitanya juga memiliki keahlian, sutra-sutra terbaik dan kain-kain yang diselingi benang emas dibuat di sini dan dikirim ke mana-mana. Mereka pandai menyulam, melukis, berbagai bentuk dan bunga-bunga dari emas di atas kain sutra dan katun (Aly,1986:158).

Peran Elit Politik

Dalam kajian ini penulis mengkatagorikan elit politik ke dalam dua kelompok yaitu, pertama elit politik memerintah (*governing elite*) merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan), seperti khalifah, raja, sultan, presiden, gubernur, dan lainnya. Kedua, elit politik tidak memerintah (*non-governing elite*) adalah seseorang yang tidak memiliki jabatan dalam kekuasaan namun menduduki posisi

strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Duverger,1987:179).

Peran Elit Politik Memerintah (Governing Elite)

Elit politik Kesultanan Palembang Darussalam yang berbentuk monarki merupakan golongan bangsawan. Golongan bangsawan dan elit ini adalah pemegang kekuasaan berdasarkan “wahyu Tuhan”, sebagai dasar karisma dan legilitas. Para bangsawan yang setia mempunyai kesempatan menjadi pembantu raja. Dasar kesetiaan dan kepercayaan ini diimbangi pula dengan orang-orang yang paling dekat (keluarga) dengan raja (Hanafiah,1995: 172).

Hubungan raja dengan pembantunya, yaitu golongan elit atau bangsawan, diuraikan oleh Onghokkam yang dikutip oleh Hanafiah (1995:173):

“Biarpun dalam teori raja adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Namun, dalam prakteknya perintah raja tidak dapat demikian saja dituruti dan ditaati oleh rakyat, perlu ada penghubung. Raja tetap memerlukan aparat, suatu golongan yang di Jawa disebut priyayi yang melaksanakan kebijakannya atau yang memerintah rakyat untuk kepentingan raja.” “... Golongan priyayi (elit) merupakan kawula raja yang langsung. Rakyat biasa bukan kawula raja, tetapi tunduk dan takluk kepada masing-masing pejabat yang dituntut rakyat.”

Dalam konteks Kesultanan Palembang Darussalam yang dikatakan sebagai elit politik memerintah merupakan kelompok priyayi. Priyayi berarti keturunan raja-raja atau kaum ningrat. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran atau atas perkenaan dari raja. Priyayi dibagi lagi menjadi tiga golongan: Pangeran, Raden dan Masagus. Pangeran berarti yang memerintah, gelar ini harus selalu diberikan oleh raja dan tidak seorang pun mendapatkannya tidak mempunyai jabatan. Anak kandung laki-laki raja dan anak keturunan dari para pangeran biasanya dikaruniai gelar itu (Aly,1986:156).

Tetapi gelar ini tidak otomatis, artinya gelar hanya diberikan sultan kepada orang yang dikehendaki. Juga gelar ini dapat dicabut bila dikehendaki sultan (Rahim,1998:62).

Dalam ketentuan adat Melayu-Jawa gelar Pangeran yang tertinggi adalah Pangeran Ratu. Gelar ini biasa diberikan kepada putera mahkota (biasanya anak laki-laki tertua dari sultan). Hal berbeda pernah terjadi sultan memberi gelar anak laki tertuanya dengan Prabu Anom, bukan Pangeran Ratu. Pemberian gelar Prabu Anom itu dilakukan oleh Sultan Ahmad Najamuddin IV (1821-1825). Hal ini dilakukan karena anak laki-laki tertua Sultan Mahmud Badaruddin II yang masih hidup telah memakai gelar Pangeran Ratu. Raden yang berarti tinggi dan terpilih. Anak kandung hasil perkawinan seorang pangeran dengan anak perempuan dari seorang pangeran diberi gelar raden dan tak seorang pun dapat merebut gelar tersebut daripadanya (Aly,1986:156). Itu artinya gelar tersebut berlaku otomatis dan tidak diberikan kepada orang lain (Rahim,1998:62).

Kemungkinan bukan golongan bangsawan (elit) dapat saja menduduki jabatan karena dedikasi dan loyalitas kepada raja. Untuk lebih mengangkat kesetiaan ini diikat dengan lembaga perkawinan dengan kerabat raja. Kondisi ini melahirkan lembaga kebangsawanan yang bertingkat atau berjenjang. (Hanafiah,1995:173). Masagus berarti gelar berharga banyak. Gelar ini dimiliki oleh anak laki-laki sah asal perkawinan seorang pangeran atau raden dengan seorang perempuan dari golongan rakyat. (Aly,1986:157 dan lihat juga Rahim,1998:62).

Istri dari para priyayi juga diberi gelar kebangsawanan yaitu, isteri sultan disebut ratu. Isteri dan anak perempuan dari pangeran dan raden disebut raden ayu atau sering disingkat *denayu*. Sedangkan Isteri dan anak perempuan dari masagus disebut masayu (Rahim,1998:62).

Golongan kedua dan ketiga mereka tidak memiliki harta benda yang dapat diwariskan. Tetapi banyak dari mereka dikarunai beberapa dusun atau marga oleh raja.

(Aly,1998:157). Merekalah yang kemudian digolongkan para elit dan memiliki peran politik di Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pembuat kebijakan dan pengatur rakyat. Untuk melihat peran elit tersebut dapat dilihat dari struktur pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam.

Pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam berada langsung di bawah sultan. Pelaksanaan tugas harian pemerintah biasanya dilakukan oleh putera mahkota (Pangeran Ratu). Pemerintahan di bawahnya adalah empat *mancanegara* (pembesar-pembesar kesultanan) sebagai bagian *pancalang lima* (suatu lembaga pemerintahan Palembang yang mengikuti Majapahit yang telah diislamisasikan yang meliputi susuhunan (sultan), adipati, pepatih, guru (diganti penghulu) hakim (jaksa negara) (Rahim, 1998: 67). P. De Roo De Faille (1971:32-34) dalam bukunya “Dari Zaman Kesultanan Palembang” menguraikan empat *mancanegara* yang meliputi:

1. Papatih (*rijksbestuurder*) di sini namanya Pangeran Natadiraja memiliki peranan memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota (negara) maupun di daerah hulu sungai (uluan). Ia adalah *mancanegara* yang pertama, yang menjalankan hukum adat dalam negeri Palembang serta jajahannya. Keterangan selanjutnya: ia adalah sebenarnya kepala pemerintahan kerajaan, orang yang mengusahakan pelaksanaan dari perintah-perintah raja. Di bawah pengawasannya pendapatan dari kerajaan dikumpulkan. kepadanya semua urusan kerajaan disampaikan. Dalam perang, ia menguasai sarana-sarana untuk berperang, meskipun ia sendiri tidak ke medan perang. Ia mengusulkan pajak-pajak dan kerja-kerja wajib kepada raja, dan nasehat (pendapatnya) pun diminta oleh raja, jika mau menaikkan atau menurunkan pajak-pajak itu.
2. Nata-agama, kepala alim ulama, yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum-hukum agama.
3. Kyai Tumengung Karta, yang di dalam segala hal merupakan tangan kanan dari Papatih, terutama disertai pengadilan hakim dan pembesar utama di Palembang. Ia memiliki seorang Temenggung sebagai pembantunya. Ia mengadili menurut al-Qur'an dan Hadist atau adat dan putusannya harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan.
4. Pangeran Citra, kepala dari *pengalasan* yaitu polisi bersenjata dari raja yang disertai tugas pelaksanaan hukuman-hukuman mati. Keterangan selanjutnya: dari segala orang yang akan ditangkap atau dibunuh, diserahkan kepada Pangeran Citra, kepala dari segala pengalasan. Adapun pengalasan adalah hulubalang sultan yang jaga kota. Pada umumnya hulubalang adalah penjabat-penjabat militer yang merupakan pengawal dari penguasa dan siap sedia untuk melakukan perintahnya kepada setiap kesempatan.

Husni Rahim (1998:69) memberikan gambaran mengenai *mancanegara* atau *pancalang lima*. Masing-masing *mancanegara* mempunyai jajaran pegawai kesultanan yang terdiri dari:

1. Pegawai-pegawai tinggi (yang dijabat oleh priyayi-priyayi yang bergelar pangeran, raden dan kiagus); Mantri-mantri sebagai pegawai rendahan (yang diberi gelar tumenggung, rangga, demang dan ngabehi); penjabat-penjabat kehakiman; kesemuanya di bawah patih.
2. Para hulubalang dan laskar kesultanan dengan berbagai tingkatannya. Mereka berada di bawah komando Pangeran Citra (Adipati).
3. Penjabat-penjabat agama yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nata Agama, baik di ibukota Palembang maupun daerah uluan. Penjabat tersebut terdiri dari para khatib penghulu, khatib imam, khatib dan modin.
4. Penjabat dan pegawai di bidang pelabuhan yang dikepalai oleh syahbandar.

Peran Elit Politik Tidak Memerintah (Non-Governing Elite)

Elit politik tidak memerintah (*non-governing elite*) adalah seseorang atau sekelompok yang tidak memiliki jabatan dalam kekuasaan namun menduduki posisi strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Duverger, 1987:179).

Dalam kajian ini elit politik yang tidak memerintah yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dengan elit politik yang memerintah adalah kelompok aristokrat dagang kolonial yaitu Belanda dan Inggris. Kedatangan bangsa Belanda untuk berdagang pertama kali ke Nusantara tahun 1596. Berawal dari kedatangannya itu, para pedagang Belanda semakin banyak yang berlayar ke Nusantara sehingga menyebabkan persaingan, maka para pedagang itu disatukan dalam badan dagang yang besar. Tahun 1602 dengan nama *Verrenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) badan ini diberi hak otonomi dalam menjalankan pemerintahan dan perdagangan di daerah jajahan (Kartodirjo, 1992:71).

Masa VOC (1602-1798), saat negeri Belanda di bawah Republik Federal yang didominasi oleh para aristokrat pedagang, kekuasaan pemerintahan daerah jajahan ditentukan oleh direktur. Tahun 1608 untuk pertama kalinya diangkat seorang gubernur jenderal (*gouverneur-generaal*) sebagai pimpinan utama pemerintahan dan perdagangan VOC di Indonesia. Tahun 1619 oleh G.G Jan Pieterzoon Coen dibangun kantor dagang di Batavia (Daliman,2012:1).

Masuknya Belanda ke Palembang tahun 1616, pada mulanya menganggap arti perdagangan dengan Palembang relatif kecil dibanding di Jambi oleh sebab itu perdagangan dilakukan dengan setengah hati. Diketemukannya timah di Bangka membuat pihak kolonial Belanda menjadi serius dan meminta izin kepada kesultanan untuk mendirikan loji di Sungai Aur (Hanafiah,1987:13).

Tidak hanya kolonial Belanda yang berupaya memperoleh perdagangan di Palembang. Inggris juga ikut serta dalam perdagangan ini. Inggris dengan EIC (*East India Company*) berusaha untuk memperoleh hak monopoli dagang dengan jalan membuat perjanjian dengan penguasa di Palembang. Selain itu mereka menempatkan petugas-petugas untuk melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah yang mereka kuasai yang bekerja di samping komandan pasukan tiap loji atau perdagangan (PemProv,1986:10).

Peranan kolonial baik Belanda maupun Inggris pada awalnya merupakan kongsi dagang bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Perkembangan berikutnya kolonial dengan segala usaha menekan harga jual-beli demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin bagi pihaknya. Kemudian meningkatkan monopoli secara paksa, dan mulai mencampuri urusan dalam negeri kesultanan untuk akhirnya menguasai langsung kesultanan (Amin,1986:102).

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam tidak pernah lepas dari berbagai kudeta, perselisihan dan peperangan. Hal tersebut memang sudah lazim dalam catatan sejarah pemerintahan berbentuk monarki. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai faktor baik dari interen maupun dari eksteren. Konflik yang berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dari uraian mengenai konflik elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial dalam perebutan kekuasaan tahun 1803-1821 dapat disimpulkan:

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pareto yang membagi kelompok elit politik yaitu elit politik yang memerintah (*governing elit*) dan elit *non*-memerintah (*non-governing elit*). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelompok elit memerintah adalah sultan, menteri dan kelompok priyayi lainnya. Kelompok elit memerintah memiliki peran penting untuk membuat kebijakan, mengatur stabilitas ekonomi, menjaga keamanan warga di wilayah kekuasaannya dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan elit *non*- memerintah dalam kajian ini adalah kolonial Inggris dan Belanda. Kelompok elit *non*-memerintah memiliki peran sebagai pedagang. Kemudian peran kolonial mulai menekan ekonomi kesultanan dengan memonopoli perdagangan dan kemudian mencampuri urusan dalam negeri kesultanan.

Terkait dengan konflik internal di Kesultanan Palembang Darussalam antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II merupakan konflik yang diakibatkan oleh rasa dari kekecewaan Sultan Mahmud Badaruddin II atas sikap

Sultan Ahmad Najamuddin II yang berkhianat. Selain itu, konflik ini juga distimulasi oleh kolonial sehingga konflik ini tidak berkesudahan. Sedangkan konflik eksternal antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial merupakan konflik yang dilatar belakangi oleh upaya mempertahankan kedaulatan dan kekayaan bagi kolonial adalah upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, keamanan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konflik dengan Kesultanan, kolonial lebih banyak menggunakan strategi *contentious* yaitu strategi yang hanya menguntungkan kolonial.

Berbagai cara untuk menyelesaikan konflik antara kedua pihak yang berkonflik, namun keduanya tidak menemukan solusi terbaik, sehingga konflik intern dan eksteren di Kesultanan Palembang Darussalam mengalami kemandekan dan kemudian mengalami eskalasi dengan meletusnya perang 1819 dan 1821. Perang 1819 yang merupakan perang pertama antara Kesultanan Palembang dengan Kolonial Belanda yang pada dasarnya peperangan ini berdimensi ekonomi-politik untuk memperebutkan sumber daya alam dan kekuasaan atas wilayah kesultanan. Perang tahun 1819 terjadi dua kali peperangan dan Kesultanan Palembang Darussalam mampu menaklukkan kekuatan kolonial. Akan tetapi perang tahun 1821 kolonial Belanda dengan segenap kekuatan senjata mampu menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam. Selain dengan kekuatan senjata, kolonial Belanda menggunakan politik *divide at ampere* (politik adu domba) untuk menghancurkan kekuatan kesultanan dari dalam.

Saran

Berdasarkan pada apa yang telah diungkapkan di atas mengenai *Konflik Elit Politik di Tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan Kolonial Dalam Perebutan Kekuasaan Tahun 1803-1821*, penulis perlu untuk memberikan saran berkenaan dengan hasil penelitian tersebut. *Pertama*, dalam membaca sejarah Kesultanan Palembang Darussalam harus benar-benar selektif dalam menemukan data sebab beberapa penulis

sejarah masih terlalu fanatik dan mengagungkan Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu perlunya kritik dan interpretasi yang lebih mendalam dengan penggunaan bidang keilmuan sosial lainnya. *Kedua*, konflik akan terus berlangsung dan akan terjadi ketika manusia di muka bumi masih melakukan komunikasi. Kegagalan komunikasi sering kali menimbulkan dampak bagi lahirnya konflik, oleh karena untuk mengetahui dan mengatasi konflik perlu adanya pengetahuan yang lebih mengenai ilmu psikologis. *Ketiga*, penulis menyarankan bagi Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, dan khususnya Perpustakaan Program Pascasarjana (Pps) agar menambah referensi–referensi tentang Kesultanan Palembang Darussalam.

Rekomendasi

Studi atau kajian terdahulu tentang Kesultanan Palembang Darussalam dapat dinyatakan masih langka, walaupun telah ada beberapa penelitian tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Namun pembahasannya belum tuntas secara konferensif. Di tengah kelangkaan sarjana yang menjadikan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai subjek penelitian. Dari latar belakang di atas, penulis mengharapkan dan merekomendasikan peneliti agar menjadikan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai subjek penelitian dan dikaji secara komperensif.

REFERENSI

- Abdullah, Ma'moen. *Masuk dan Berkembangnya Islam pada Zaman Kesultanan Palembang: Suatu Analisis dalam KHO Gadjahnata*, Sri dan Edi Swasono (ed). 1968. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta; UIN Press
- Abdullah, Taufik. 1986. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3IS
- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Akib, R.H.M.1978. *Sejarah Perjuangan: Sri Sultan Mahmoed Badaroedin ke II Palembang*. Palembang: Rhama
- Amin, H.M. Ali. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, dalam KHO Gadjahnata, Sri dan Edi Swasono (ed). 1968. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta; UIN Press
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyur- Rahman,1997. *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aly, Salman. *Sejarah Kesultanan Palembang*, dalam KHO Gadjahnata, Sri dan Edi Swasono (ed). 1968. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta; UIN Press
- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arkoun, M. 1996. *Rethinking Islam*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bruneissen, Martin van. 1992. *Tarekat dan Politik: Amalan Dunia dan Akhirat dalam Majalah Pesantren* vol. IX no. 1
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, sebuah analisis konflik*, terj. Ali Manda. Jakarta. Rajawali
- Daliman, A. 2012. *Metode penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- _____. 2012. *Sejarah Indonesia: Abad XIX- Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak
- Duverger, Maurice. 1987. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2003. *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidea. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Esposito, John L. 1990. *Islam dan Politik*, terj. Joesoef Syou'b. Jakarta: Bulan Bintang
- Faille, P. De Roo De La. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terj. Soegarda Poerbakawatja. Jakarta: Bhratara
- Farida. 2012. *Perang Palembang dan Benteng Pertahanannya Tahun 1819-1821*, dalam seminar nasional "Palembang: Masa Lalu, Kini dan Masa Depan", Palembang.
- Garrachan.1946. *A Guide to Hisrorical Method*. New York: Fordham University Press
- Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar; Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo
- Gootschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* . Jakarta: UI Press
- Hall, Calvin S. 1954. *Sigmund Freud: Suatu Pengantar ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud*. Jakarta: Pustaka Sarjana
- Hamka. 1997. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional
- Hanafiah, Djohan. 1986. *Perang Palembang 1819-1821 M: Perang laut Terbesar di Nusantara*. Palembang: Pariwisata Jasa Utama
- _____. 1989. *Kuto Besak; Uapaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Masagung
- _____. 1995. *Melayu-Jawa; Citra Budaya & Sejarah Palembang*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Hariwijaya, M. 2007. *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: elMatera Publishing

- Hatamar, 2007. *Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Hitti, Philip K. 2010. *History of the Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Hoven, JL. van Seven. 1971.” *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*”, Terj. Sugarda Purba Kawatja . Djakarta : Bhratara
- Huda, Nor. 2007. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Idi, Abdullah *Kerajaan Sriwijaya: Nilai-nilai Strategis da Implikasinya terhadap kebijakan otonomi Daerah*, dalam Zulkifli dan Abdul Karim Nasution.2001. *Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ishomuddin. 2005. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Press
- Junaidi, Heri. 2001. *Sejarah Kudeta Dalam Kebudayaan Islam: Studi Kesultanan Palembang Darussalam* dalam Laporan Penelitian, tidak diterbitkan. Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____.1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Krugman, Paul R dan Maurice Obstfeld. 2002. *Ekonomi Internasional:Teori dan Kebijakan*, terj. Faisal H. Basri. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mahmud, Kiagus Imran. 2004. *Sejarah Palembang*. Palembang: Penerbit Anggrek Palembang
- Mahruf, Kamil dkk.1999. *Pesemah Sindang Merdika: 1821-1866*. Jakarta: Pustaka Asri
- Maman, Ukas. 2006. *Menejemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Renika Cipta

- Mansyur, Amrizal, tth. *Menganalisis Perang Yom Kippur dengan Teori Sun Tzu*. Jakarta: tidak diterbitkan
- Mitchell, Duncan. 1984. *Sosiologi Suatu analisa Sistem Sosial*. Jakarta: Bina Aksara 'Anggota IKAPI'
- Moleong, J.Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muda, Ahmad A.K. 2006. *KAMUS Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher
- Muljana, [Slamet](#). 2006. *Sriwijaya*. Yogyakarta: LKIS
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nasution, Dahlan.1988. *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung: Remadja Karya
- Natalis, Decki dan Pigay Bik. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Panji, Kemas A. Rachman. 2006. "Menelusuri Jejak Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam yang Tersisa Pangeran Bupati Panembahan Hamim (1779-1879 M)", dalam *Jurnal Tamadun*, 2/volume VI/ Juli Palembang: Fakultas Adab, IAIN Raden Fatah
- Peeters, Jeroen. 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Socaial Religieuze Verandering in Palembang*. Terj. Sutan Maimoen. Jakarta: INIS
- PemProv. 1986. *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud badaruddin II: Pahlawan Kemerdekaan Nasional*. Pemerintah Provinsi Daerah TK.I, Palembang
- Poerwadarminta, W.J.S. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Purwadaksi, Ahmad. 2004. *Ratib Samman dan Hikayat Syekh Muhammad Samman*. Jakarta: Djambatan
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Penjabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos

- Roy, S.L. 1995.*Diplomasi*. Jakarta:RajaGrafindo Persada
- Usman, Husaini dan Purnomo Seiady Akbar. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pruitt, Dean & G. Jeffrey. Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rinardi, Haryono. 2007. *Konflik Elit Politik Indonesia Masa Awal Revolusi Kemerdekaan:Munculnya Dekrit Wapres No X 16 Oktober 1945* dalam Jurnal Sejarah Lekha Vol XI 1 Febuari 200, tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponogoro
- S, Poerwordaminto, W. J.2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sarwono, Sarlito W. 1995. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sears, David O, et. al. 1991. *Psikologi Sosial*, terj. Micheal Adryanto. Jakarta: Erlangga
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI-Press
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengatantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Sevenhoven,J.L. van. 1975. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Jakarta: 1971
- Soekanto, Soerjono. 2010.*Sosologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____ dan Ratih Lestarini. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta: sinar grafika.
- Steenbrink, Karel.1995. *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Sukirno,Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia,
- Suryarata, Sumardi. 1997. *Metodelogi Penelitian* .Jakarta: Raja Grafindo
- Susanto, Phil Astrid.1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*.Jakarta: Bina Cipta
- Syawaluddin, Mohammad. 2008. “*Paradigma Relasi Islam-Negara*, dalam makalah mata kuliah Ilmu Politik Islam disajikan pada pertemuan ke V dan VI, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Adab, IAIN Raden Fatah. Palembang: tidak diterbitkan.

- Teguh, Muhammad. 2010. *Ekonomi Industri*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tjandrasasmita, Uka. 2000. *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia: dari Abad XIII Sampai XVII Masehi*. Kudus: Menara Kudus
- _____. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Triyono. 2007. “ *Masa Pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II.*” dalam <http://kesultananpalembangdarussalam.com/index.php?view=article&id=15%3Asilsilah-kesultanan&option=com>, di-akses pada 12 Juli 2010
- Usman, Husaini dan Purnomo Seiady Akbar. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Utomo, Bambang Budi, dkk. 2005. *Kota Palembang; Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Palembang : Peguyuban Masyarakat Peduli Musi
- Varma, S. P. 1987. *Teori Politik Modren*. Jakarta: Rajawali Pers
- Vlekke, Bernand H.M. 1961. *Nusantara: A History of Indonesia*, terj. Samsudin Berlian. 2008. Jakarta: KPG
- Wikipedia.2008. ”*Sultan Mahmud Badaruddin II*”. dalam [http://;Wikipedia/Sultan_Mahmud_Badaruddin_II.htm](http://Wikipedia/Sultan_Mahmud_Badaruddin_II.htm). di-akses pada 21 Juni 2010
- Yatim, Badrim. 2007. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Yunan. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, dalam Tesis, Universitas Sumatera Utara. Medan: Tidak diterbitkan.
- Zulkifli dan Abdul Karim Nasution. 2001. *Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ravico

Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 13 Agustus 1988

Alamat : Jl. Tebat Permai Blok C Ujung Lahat. Kab. Lahat

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan

SD : Sekolah Dasar Negeri 19 Lahat tahun 1994-2000

SMP : SMP Negeri 5 Lahat tahun 2000-2003

SMA : SMA Al- Ikhlas Lubuk Linggau tahun 2003-2006

S1 : IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2006-2010

Fakultas Adab

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam

Hobi : Jelajah Sejarah, membaca dan *tarvelling*

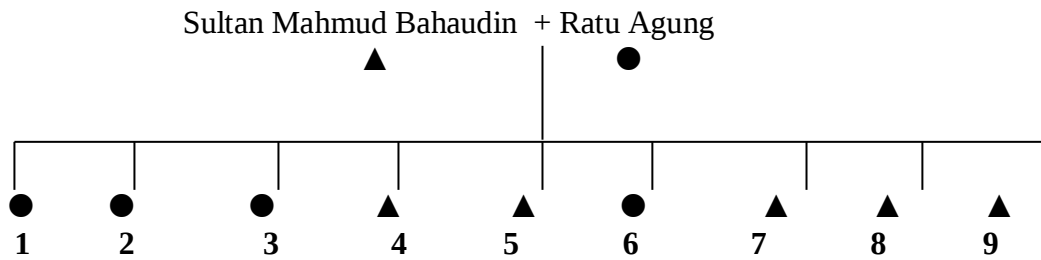
Nama Ayah : Zulkodri

Nama Ibu : Rahmawati

Karya Tulis : -

Riwayat Organisasi : Anggota dokter kecil di Sekolah Dasar Negeri 19 Lahat tahun 1999-2000
 Anggota Palang Merah Remaja tahun 2002-2003
 Sekretaris Pramuka Putra Pondok Pesantren Modern al-Ikhlas tahun 2004-2005
 Wakil Ketua Osis Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas tahun 2004-2005
 Ketua Bem-F Adab IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2009-2010

Silsilah Sultan Muhammad Bahauddin



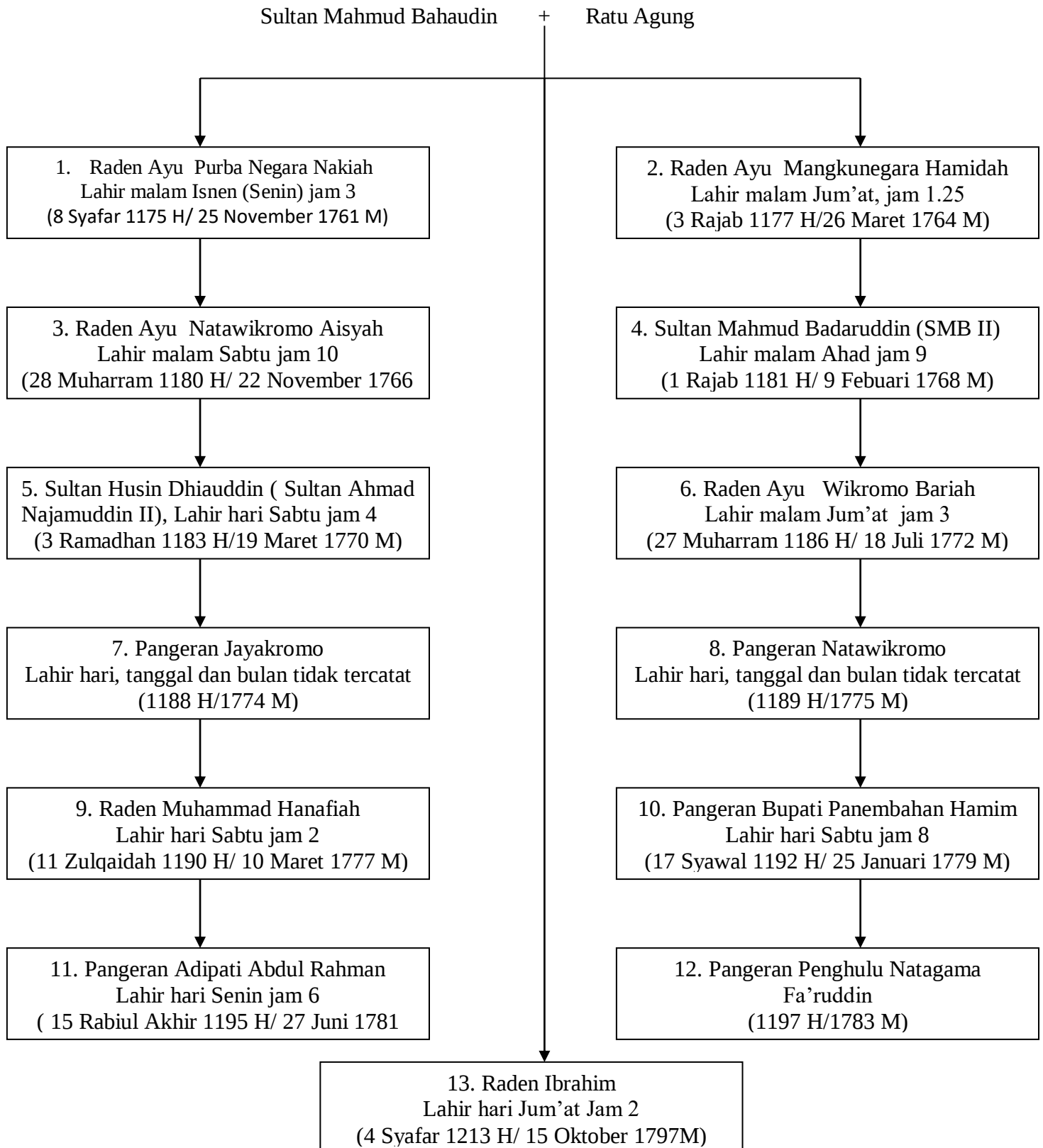
Keterangan :

- ▲ : laki-laki
- : perempuan
- +
- : hubungan darah

1. Raden Nyayu Purba Negara Balkiah
2. Raden Nyayu Mangku Negara Hamidah
3. Raden Nyayu Wikrama Haisyah
4. Raden Hasan Pangeran Ratu/ Sultan Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II)
5. Sultan Susuhunan Husin Dhiauddin (Sultan Mudo)
6. Raden Nyayu Suta Wikrama Barriah
7. Raden Muhammad Hanafiah
8. Pangeran Bupati Panembahan Hamim/ Pangeran Depati Hamim
9. Pangeran Adipati Abdulrahman

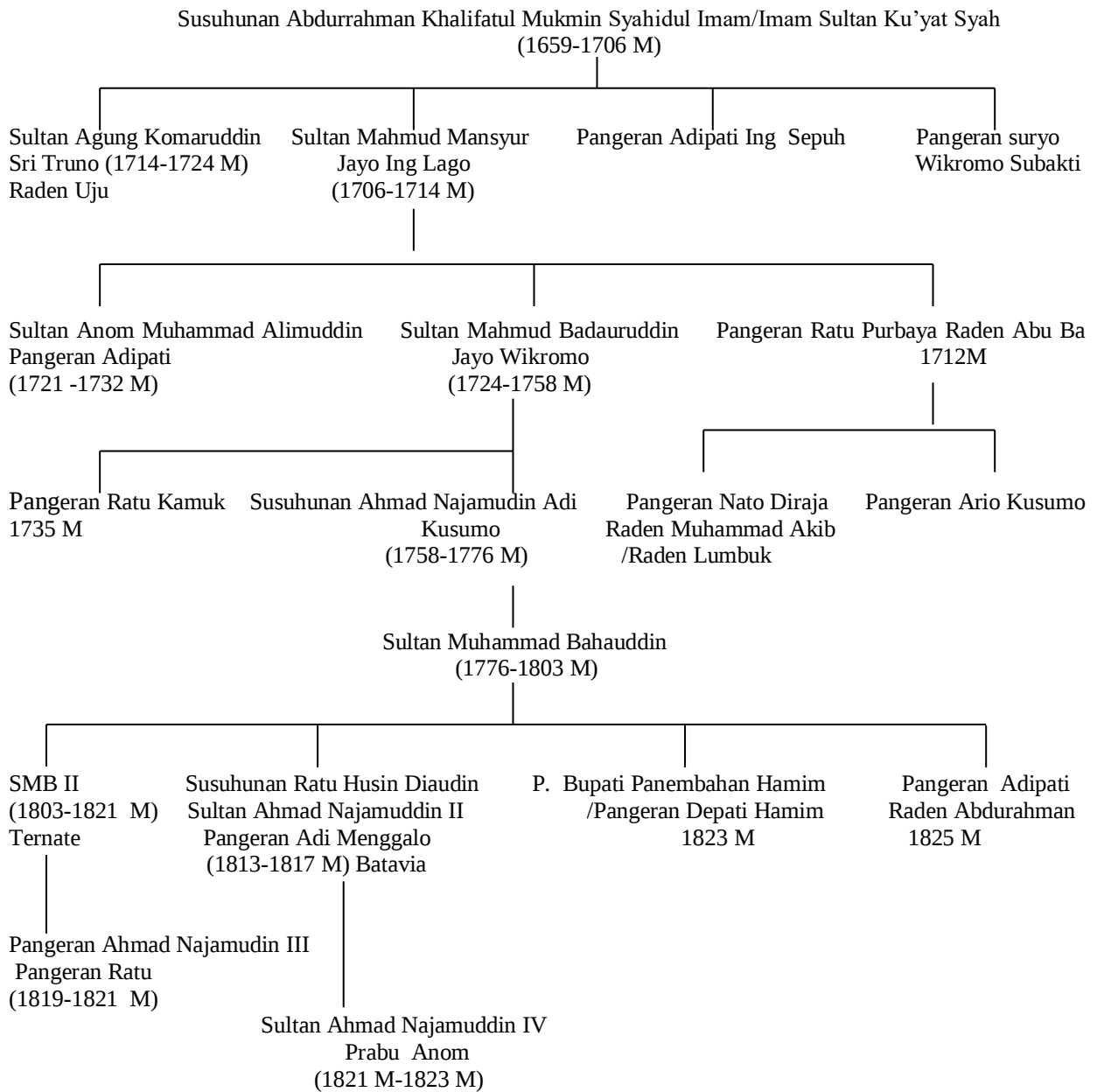
Sumber: catatan silsilah yang ada pada Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diraja
(Raden Muhammad Syafe'i Prabu Diraja)

Zuriat Sultan Muhammad Bahaudin



Sumber: zuriat Pangeran Depati Hamim (Raden Abdul Qadir bin Abdul Rachman dan Raden Nawawi bin R.H. Syahabudin)

Silsilah Para Penguasa dan Raja Palembang



Sumber: Raden Muhammad Husin Nato Dhirajo, 1994, "Silsilah Para Penguasa dan Raja Palembang", diambil di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II pada 13 April 2010. Sumber Penulisan: 1. Kitab "Asal-Usul dan Zuriat Raja-Raja Palembang, tulisan Raden Muhammad Akib bin Raden Idris di Palembang tahun 1323 H (1906). 2. Daftar Raja-Raja Palembang dan Para Zuriat/Priyayi Palembang yang disalin dari dokumentasi priyayi Palembang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Tim Penguji Tertutup.....	iii
Pengajuan Akhir Tesis.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Surat Pernyataan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Pedoman Transliterasi.....	xii
Abstrak.....	xvii

BAB

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	14
Tujuan Penulisan	14
Kegunaan Penelitian	14
Tinjauan Pustaka	15
Landasan Teori	17
Definisi Oprasional.....	24
Metode Penelitian.....	26
Sistematika Penulisan	34

2. PERAN ELIT POLITIK DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1803-1821

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam	36
Situasi dan Kondisi Kesultanan Palembang Darussalam Sebelum Tahun 1803	45
<i>Kondisi Ekonomi</i>	45
<i>Kondisi Politik</i>	51
<i>Kondisi Sosial</i>	56

Peran Elit Politik	61
<i>Peran Elit Politik Memerintah (Governing Elite).....</i>	<i>62</i>
<i>Peran Elit Politik Tidak Memerintah (Non-Governing Elite)</i>	<i>65</i>

3. KONFLIK ELIT POLITIK DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1803-1821

Konflik Interen di Kesultanan Palembang Darussalam	Error! Bookmark not defined.
Konflik Ekstern di Kesultanan Palembang Darussalam.....	Error! Bookmark not defined.
<i>Konflik Segitiga Antara Kesultanan Palembang, Inggris dan Belanda</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Konflik Kesultanan Palembang dengan Kolonial Inggris</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Konflik Kesultanan dengan Kolonial Belanda.....</i>	Error! Bookmark not defined.

4. PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI AKIBAT ESKALASI KONFLIK ELIT POLITIK KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1803-1821

Peristiwa Perang 1819	Error! Bookmark not defined.
<i>Babak I (Perang Menteng).....</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Babak II.....</i>	Error! Bookmark not defined.
Peristiwa Perang 1821	Error! Bookmark not defined.

5. PENUTUP

Kesimpulan	67
Saran	68
Rekomendasi	69

REFERENSI

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN